PARTAI POLITIK DAN JARINGAN TIM SUKSES

STUDI PASANGAN AGUS-NADIA MENGGUNAKAN PARTAI POLITIK SEBAGAI MESIN POLITIK UNTUK MEMOBILISASI PEMILIH PADA PILKADA 2024 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik

Oleh :

Riza Utami

2106016046

PRODI STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi/ Proposal Skripsi

Kepda.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi/ skripsi saudara/i:

Nama : Riza Utami
NIM : 2106016046
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Partai Politik dan Jaringan Tim Sukses: Studi Pasangan Agus-Nadia Mengunakan Partai Politik Sebagai Mesin Politik Untuk Memobilisasi Pemilih Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,5 Maret 2025
Pembimbing

Muhammad Mahsun, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Partai Politik dan Jaringan Tim Sukses : Studi Pasangan Agus-Nadia Menggunakan Partai Politik Sebagai Mesin Politik Untuk Memobilisasi Pemilih Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung

Disusun Oleh :

RIZA UTAMI

2006016046

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 30 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS. Susunan Dewan Penguji**

Ketua Sidang Penguji 1

Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 19851182023211019

Penguji 1

Tika Ifranda Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

Penguji 2

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP.198505022019031007

Dosen Pembimbing

Muhammad Mahsun, M.A

NIP. 1985118202321101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "Partai Politik dan Jaringan Tim Sukses: Studi Pasangan Agus-Nadia Menggunakan Partai Politik Sebagai Mesin Politik Untuk Memobilisasi Pemilih Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau di lembaga tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak diterbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 30 juni 2025

Yang Menyatakan

Riza Utami

NIM : 2106016046

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Wa Syukurillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Partai Politik dan Jaringan Tim Sukses: StudiPasangan Agus-Nadia Menggunakan Partai Politik Sebagai Mesin Politik Untuk Memobilisasi Pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung". Shalawat teriring salam kepada para Rasul yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk kita semua.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya keterbatasan dan kekurangan penulis, dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo. Penulis mengetahui dan menyadari bahwa, tulisan ini jauh dari kata sempurna, dan mudah-mudahan nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang bersedia membacanya.

Perjalanan panjang yang penulis lalui dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan dan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini dibuat dengan ketulusan hati penulis dengan mendapat banyak dukungan, semangat, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak secara moril, ataupun materil dan alhasil skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu izinkan penulis untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan kesehatan bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan

dan menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendukung penulis melakukan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Mahsun, M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran serta motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingannya kepada penulis, dari mulai penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai dibuat. Terimakasih telah menyempatkan waktu untuk pembimbing penulis ditengah kesibukannya.
6. Ibu Masrohatun, M.Si selaku Wali Dosen penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berbagi ilmu dan mengajarkan penulis tentang berbagai pengetahuan baru yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan Program Studi Saarjana Prodi Ilmu Politik.
8. Seluruh jajaran Staf Tenaga Pendidik dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membantu penulis dalam kebutuhan administratif penelitian skripsi.
9. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia menerima penulis, untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir. Sehingga, penulis mendapatkan berbagai data-data yang dapat mendukung penelitian ini.
10. Kepada Bapak Rohamin dan Ibu Sariyatun, orang tua penulis yang menjadi sosok paling penting di balik selesainya tugas akhir ini terima kasih atas segala hal yang tak akan pernah cukup dibalas hanya dengan ucapan. Dari awal kuliah hingga masa-masa sulit mengerjakan skripsi, doa dan dukungan dari Bapak dan

Ibu selalu menjadi penopang paling kuat. Penulis menyadari, proses ini bukan hanya perjuangan pribadi, tapi juga perjalanan panjang yang dijalani bersama orang tua yang selalu hadir dengan sabar, tanpa pamrih, dan tidak pernah lelah memberikan kepercayaan. Terima kasih sudah percaya dan mendampingi sampai titik ini.

11. Untuk adik penulis, Aprillia Dwi Susanti, terima kasih karena selalu hadir memberi semangat tanpa diminta. Dukunganmu, walaupun sering terlihat sederhana, sebenarnya punya peran besar dalam menjaga semangat penulis untuk terus menyelesaikan proses ini. Kamu adalah salah satu alasan penulis tetap bertahan, walau kadang ingin menyerah.
12. Untuk diri sendiri, Risautami, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meski prosesnya berat, lambat, dan kadang bikin ragu. Kamu mungkin tidak selalu jadi yang paling cepat atau paling menonjol, tapi kamu sudah cukup kuat dan konsisten untuk menyelesaikan sesuatu yang penting. Prosesmu valid, perjuanganmu berharga, dan hasilnya layak dirayakan.
13. Kepada keluarga besar: keluarga Bapak Rosmadi dan Ibu Sumini, serta keluarga Bapak Sarkem dan Ibu Parminah, penulis ucapkan terima kasih atas setiap doa dan dukungan yang diam-diam, namun selalu terasa. Dukungan dari keluarga besar menjadi bagian dari energi positif yang ikut mendorong penulis dalam menyelesaikan studi.
14. Untuk Tante Meita Putri Handayani, terima kasih sudah menjadi tempat pulang ketika penulis butuh didengarkan. Terima kasih karena selalu siap menjadi pendengar yang sabar dan tidak pernah bosan mendampingi selama proses perkuliahan ini. Ketenangan dan dukunganmu sangat membantu di saat penulis merasa jenuh atau lelah.
15. Untuk dua sahabat yang luar biasa, Fita Nur Aulia dan Zulfa Nur Afifah, terima kasih karena sudah selalu ada meski penulis kadang terlalu bawel, terlalu panik, atau terlalu sibuk dengan skripsi. Terima kasih karena tetap mendukung dan

menjadi ruang nyaman untuk berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa. Kalian lebih dari sekadar teman, tapi juga support sistem yang nyata.

16. Hesti Khasanah, Sherley Aurora, Luthfi Bani, dan Nindy Parawansa, teman seperjuangan sejak semester awal hingga akhir penulisan skripsi ini terima kasih karena sudah saling bantu, saling mengingatkan, dan saling menyemangati. Perjalanan ini mungkin terasa berat, tapi jadi lebih ringan karena kita hadapi bersama. Terima kasih karena kalian bersedia direpotkan dan tetap hadir.
17. Untuk Jawirrr, Fitria Ulfarisa dan Abdi Hanan terimakasih karena selalu menemani penulis dan kasih dukungan untuk penulis dan selalu penulis repotin di perantauan ini. Semoga setelah perkuliahan ini berakhir kita tetap berteman dengan baik.
18. For Tuduppp Paw boneka kecil yang mungkin terlihat sederhana tapi punya arti besar sebagai penyemangat selama proses penyusunan ini. Di saat lelah dan ragu, kehadiranya selalu berhasil menghadirkan senyum dan semangat baru.
19. Untuk seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Politik, terutama kelas Politik B angkatan 2021 UIN Walisongo Semarang, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, tawa, dan perjuangan yang telah dilalui bersama. Semoga setelah ini, kita semua bisa melangkah ke jalan masing-masing dengan percaya diri dan berhasil meraih apa yang pernah dicita-citakan.
20. Dan terakhir, kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kehadiran yang memberi dampak dalam proses penyusunan skripsi ini. Sekecil apa pun kontribusi yang diberikan, semuanya sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan walau bagaimanapun penulis berusaha memberikan yang terbaik. Penulis menerima kritik dan saran dengan kelapangan hati, demi tercapainya hal terbaik dari penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan.

Semarang, 24 Juni 2025

Penulis,

Riza utami

NIM.2106016046

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan segala rasa syukur kepada Allah SWT.

Alhamdulillahirabil'alamin, Saya persembahkan sebuah skripsi ini:

Untuk dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Rohamin dan Ibu Sariyatun serta adik saya Aprillia Dwi Susanti yang selalu memberikan seluruh doa dan dukungan yang berarti dalam setiap langkah kehidupan saya. Selalu mendukung saya, dan tidak pernah mengeluh dengan segala keterbatasan proses saya.

Untuk dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Mahsun, M.A yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi.

Untuk diri saya sendiri yang sudah mau berjuang sampai pada titik ini.

Dan untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Politik yang menjadi tempat untuk saya berproses memulai pendidikan perkuliahan hingga pada titik sejauh ini.

MOTTO

"Melamban Bukan Hal yang Tabu"

-Perunggu 33x

"Pada Akhirnya, Ini Semua Hanyalah Permulaan"

-Nadin Amizah

"Man Jadda Wajada"

(Barang Siapa Bersungguh-sungguh, Maka ia Akan Berhasil)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi mobilisasi pendukung melalui pemanfaatan mesin politik partai dalam pemenangan pasangan Agus-Nadia pada Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung. Studi ini dilatarbelakangi oleh fenomena politik elektoral di Indonesia yang tidak hanya mengandalkan partai politik sebagai instrumen utama, tetapi juga melibatkan jaringan informal seperti keluarga dan tokoh masyarakat. Namun, fokus penelitian ini adalah pada penggunaan partai politik sebagai mesin politik formal yang dominan dalam membangun tim sukses dan menggerakkan dukungan pemilih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah peran struktur partai politik, mekanisme perekrutan tim sukses, serta bentuk-bentuk transaksi politik antara kandidat dan partai pengusung. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemenangan pasangan Agus-Nadia tidak terlepas dari kekuatan koalisi partai pengusung yang mampu mengorganisasi dan memobilisasi pemilih secara efektif. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada satu partai politik yang secara konsisten mendominasi Pilkada Temanggung, sehingga kekuatan figur calon dan koalisi partai menjadi faktor kunci dalam meraih kemenangan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang mesin politik dan transaksi politik dalam konteks pilkada, khususnya peran partai politik sebagai alat mobilisasi. Secara praktis, hasil penelitian memberikan wawasan strategis bagi kandidat dan tim sukses dalam merancang serta mengoptimalkan mesin politik berbasis partai untuk memenangkan kontestasi politik di tingkat daerah.

Kata Kunci: mobilisasi pendukung, mesin politik, partai politik, pilkada, Temanggung, strategi pemenangan.

ABSTRACT

This study discusses the strategy of mobilizing supporters through the use of political party machines in the victory of the Agus-Nadia pair in the 2024 Pilkada in Temanggung Regency. This study is motivated by the phenomenon of electoral politics in Indonesia which does not only rely on political parties as the main instrument, but also involves informal networks such as families and community leaders. However, the focus of this study is on the use of political parties as the dominant formal political machine in building a successful team and mobilizing voter support.

This study uses a qualitative approach by examining the role of political party structures, the mechanism for recruiting successful teams, and the forms of political transactions between candidates and supporting parties. The results of the study show that the victory of the Agus-Nadia pair cannot be separated from the strength of the coalition of supporting parties that are able to organize and mobilize voters effectively. In addition, this study found that no one political party consistently dominated the Temanggung Pilkada, so that the strength of the candidate figure and the party coalition are key factors in achieving victory.

Theoretically, this study enriches the study of political machines and political transactions in the context of regional elections, especially the role of political parties as a tool of mobilization. Practically, the research results provide strategic insights for candidates and campaign teams in designing and optimizing party-based political machines to win political contests at the regional level.

Keywords: *mobilization of supporters, political machines, political parties, regional elections, Temanggung, winning strategies.*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING 2
KATA PENGANTAR 5
PERSEMBAHAN 10
MOTTO 11
ABSTRAK 12
ABSTRACT 13
DAFTAR ISI 14
BAB I 16
PENDAHULUAN 16
A. Latar Belakang 16
B. Rumusan Masalah 20
C. Tujuan Penelitian 21
D. Manfaat penelitian 21
E. Kajian Pustaka 22
F. Metode Penelitian 25
G. Sistematika Penulisan 30
BAB II 33
Kerangka Teori 33
A. Definisi Konseptual 33
B. Landasan teori 36
C. Kerangka berpikir 38
BAB III 46
LANDSCAPE KABUPATEN TEMANGGUNG DAN DINAMIKA PILKADA 2024 46
A. Gambaran Umum Kabupaten Temanggung 46
B. Demografis Kabupaten Temanggung 48
C. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kabupaten Temanggung 52

D. Sejarah Kabupaten Temanggung 54
E. Profil Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Periode 2025–2030 57
F. Dinamika Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2024 58
BAB IV 61
POSISI DAN TUJUAN PARTAI POLITIK 61
A. Posisi Partai Politik dalam Struktur Tim Sukses 61
B. Tujuan Partai Politik 64
BAB V 67
REKRUTMEN DAN POLITIK IMBALAN DALAM TIM PEMENANGAN 67
AGUS-NADIA 67
A. Pola Rekrutmen Timses dan Orang-Orang Partai Politik 67
B. Politik Balas Budi Pasca Pemilu 70
BAB VI 75
STRATEGI PEMENANGAN DAN PATRONASE POLITIK DI TINGKAT LOKAL 75
A. Pemanfaatan Struktur Partai hingga Tingkat Ranting 75
B. Kerja Sama dengan Elite Lokal sebagai Penguat Jaringan 78
C. Keterlibatan dalam Patronase dan Vote Buying 82
BAB VII 87
KESIMPULAN DAN SARAN 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA 92
LAMPIRAN DOKUMENTASI 96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan arena politik seperti di pemilu atau pilkada, ada banyak langkah yang digunakan oleh seorang politisi untuk meraih kemenangan adalah memobilisasi pemdukung. Biasanya, mobilisasi tersebut dilaksanaka politisi ataupun partai politik tersebut, tujuannya sebagai perekrutan pendukung dan tim sukses yang kemudian dijadikan dasar serta kekuatan politik bagi pihak-pihak yang terkait. Merujuk paparan KBBI, mobilisasi berarti pengerahan orang agar bisa menjadi tentara. Sementara itu, dipaparkan pada Pasal 1 No 27 Tahun 1997 mengenai Mobilisasi dan Demobilisasi, "Definisi dari mobilisasi yakni langkah pemanfaatan dan pengerahan secara serentak sarana prasarana sekaligus sumber daya nasional yang sudah dipersiapkan untuk menjadi bagian atas kekuatan pertahanan suatu negara." Kemudian mobilisasi pendukung merujuk pada sebuah tindakan untuk mengerahkan orang atau sumber daya lain secara bersamaan, yang dilaksanakan dengan terorganisir dan sengaja oleh seorang kandidat ataupun politisi, dengan tujuan agar bisa mencapai kepentingan yang diinginkan (UUD NKRI, 1997).

Secara umum mobilisasi pendukung dilaksanakan oleh politisi untuk meraih kemenangan ketika pemilu atau pilkada. Dalam proses mobilisasi tersebut, terdapat berbagai metode atau strategi yang dapat digunakan untuk bertanding dalam pilkada. Di Indonesia, mobilisasi pendukung biasanya dilaksanakan dengan memanfaatkan mesin politik. Umumnya, mesin politik merupakan organisasi politik di mana partai politik atau seorang politisi mengerahkan dan menggerakkan dukungan dari kelompok pendukung yang sebelumnya telah mendapatkan imbalan tertentu. Merujuk paparan Edward Aspinall, mesin politik terbagi atas dua jenis, yakni yang bersifat institusional (partai politik) dan personal (adhoc). Peranan partai politik menjadi mesin politik yang sifatnya institusional digunakan agar bisa dicapai tujuan tertentu, sehubungan dengan hal tersebut agar bisa memperoleh kemenangan ketika pemilu. Berikutnya, mesin

politik dengan sifat ad hoc atau sementara terbentuk karena adanya hubungan antar individu atau hubungan pribadi, misalnya teman, keluarga, atau organisasi kekeluargaan. Ketika mereka bergabung sebagai tim sukses atau relawan, tujuannya adalah sebagai pemberi dukungan kepada kandidat yang termasuk kenalan atau kerabat mereka (Aspinall & Berenshcot, 2019).

Politik elektoral yang terlihat lewat mekanisme pemilu atau pilkada di Indonesia sebenarnya tidak senantiasa bergantung pada partai politik sebagai instrumen utama. Demikian ini juga melibatkan mobilisasi alat non-politik, misalnya jaringan sosial dan ketokohan. Sebagai contoh, dalam Pilkada Temanggung 2018 dilakukan oleh semua pasangan calon melalui pemberian uang tunai sebelum hari pemilihan. Berdasarkan survei, 53% responden mengaku menerima uang dari tim sukses, dan banyak yang mempertimbangkannya dalam memilih kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang memengaruhi perilaku pemilih. Selain itu, 87% responden menganggap praktik ini sudah menjadi tradisi yang lumrah (Maulida et al., 2021)

Pada daerah lain Salah satu contohnya adalah keterlibatan Pesantren Al-Munawwir dalam politik elektoral di Yogyakarta pada Pemilu tahun 2009 (Siregar dan Ernas 2010). Selain itu, terdapat juga keterlibatan tokoh agama (kiai) dalam Pemilihan Umum tahun 2004 di Kabupaten Banyumas (Sundari, 2005). Dengannya, bukan sekadar ditemukan di tingkatan nasional, namun keterlibatan instumen nonkepartaian pada politik elektoral di Indonesia ada juga di tingkatan daerah.

Selain itu Studi yang dikaji oleh Haloho (2017); yang membahas terkait jaringan marga sebagai Mesin Politik Pemenangan Bupati Terpilih Periode 2015-2020 yang dimana Ir. Darwin menggunakan mesin politik yang didominasi oleh jaringan marga untuk memenangkan pasangan calon bupati. Dengan memanfaatkan ikatan kekerabatan yang kuat, mesin politik ini melibatkan kerabat-kerabat dari marga dominan yang mendukung calon tersebut. Strategi pemenangan yang solid, didukung oleh kekuatan mesin politik berbasis marga, menjadi kunci dalam meraih kemenangan

pasangan Ir. Darwin Siagian dan Hulman Sitorus. Penelitian yang dilakukan oleh (Gloria, 2023); Yohanis Bassang melaksanakan pembangunan mesin politiknya pada Pilkada 2020 di Toraja Utara dengan membentuk tim sukses ad hoc yang terdiri dari keluarga, teman, kerabat, dan kenalan. Ia melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat di seluruh wilayah, memberikan bantuan berupa barang seperti babi, kerbau, dan bahan kebutuhan lainnya saat menghadiri upacara adat. Relasi dengan tim suksesnya menggunakan konsep patronage, sementara hubungan dengan partai politik bersifat asosiatif dan sementara (Hayyi et al., 2020).

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa seorang kandidat lebih banyak dalam membangun tim sukses dengan mengandalkan jaringan keluarga, teman, dan kelompok informal lainnya yang memanfaatkan institusi non-formal. Studi ini berbeda karena lebih memfokuskan pada bagaimana kandidat memanfaatkan partai politik atau organisasi formal . Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih menekankan pada institusi informal, Fokus penelitian ini adalah bagaimana seorang kandidat membangun mesin politik untuk memenangkan pilkada melalui jaringan formal, yakni partai politik. Dalam hal ini, kandidat tidak hanya mengandalkan hubungan informal, tetapi juga memanfaatkan organisasi formal, dengan partai politik menjadi elemen dominan dalam struktur tim sukses untuk meraih kemenangan. Studi ini akan dilakukan di Kabupaten Temanggung, dengan fokus kajian pada pasangan Agus-Nadia dalam pilkada 2024.

Melihat kembali ke Pilkada Temanggung 2018, kontestasi diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Bambang Sukarno–Matoha yang didukung oleh PDI Perjuangan dan PKB; Haryo Dewandono–Irawan Prasetyadi yang diusung oleh koalisi Partai NasDem, Hanura, dan Demokrat; serta Muhammad Al Khadziq–Heri Ibnu Wibowo yang diusung oleh Partai Gerindra, PPP, Golkar, dan PAN. Pasangan Khadziq–Bowo keluar sebagai pemenang dengan 258.734 suara dan unggul di 17 dari 20 kecamatan. Sementara itu, pasangan petahana Bambang–Matoha hanya memperoleh 156.576 suara dan menang di tiga kecamatan, sedangkan Haryo–Irawan menempati posisi terakhir

dengan 60.988 suara. Tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, mencapai 85,47%, tertinggi di Jawa Tengah, meskipun seluruh pasangan calon tidak menggelar kampanye terbuka karena alasan efisiensi biaya dan berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri (Sahea et al., 2018).

Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung, terlihat jelas bahwa partai-partai politik memainkan peran strategis dalam menentukan hasil pemilihan. Tiga pasangan calon kembali bersaing, yakni pasangan nomor urut 1, Agus Setyawan dan Nadia Muna, yang diusung oleh PDIP, Hanura, PKS, dan PPP, berhasil memenangkan pilkada dengan raihan 230.436 suara. Kemenangan ini menunjukkan kekuatan mesin politik dari koalisi partai pengusung. Pasangan nomor urut 2, Heru Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, yang diusung oleh Demokrat, PKB, Gerindra, dan PSI, meraih 199.854 suara, namun gagal melampaui Agus dan Nadia. Sementara itu, pasangan nomor urut 3, Muhammad Al-Khadziq dan Bimo Alunggoro, yang diusung oleh Golkar, PAN, dan NasDem, hanya mendapatkan 63.841 suara. Kemenangan ini kemudian disahkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Temanggung No. 505/PL.02.6-BA/3323/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang menandakan bahwa mesin politik yang bekerja melalui dukungan partai-partai yang mengusung pasangan Agus dan Nadia berhasil meraih hasil yang diinginkan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pasangan Agus-Nadia memanfaatkan partai politik sebagai mesin politik untuk membangun tim sukses yang efektif dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia (Ulum, 2021).

Jika melihat dinamika dari waktu ke waktu, terlihat bahwa tidak ada satu partai politik yang secara konsisten mendominasi Pilkada di Kabupaten Temanggung. Kemenangan selalu berpindah dari satu koalisi partai ke koalisi lainnya, menunjukkan bahwa pemilih di Temanggung cenderung rasional dan terbuka terhadap berbagai alternatif politik. Pola ini mengindikasikan bahwa dukungan masyarakat tidak sepenuhnya terikat pada afiliasi partai tertentu, melainkan lebih pada figur calon dan kekuatan koalisi yang dibentuk dalam setiap pemilihan (Prihatmoko, 2005).

Berdasarkan latar belakang diatas, Studi ini berfokus pada tiga aspek utama dalam kemenangan pasangan Agus-Nadia pada Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung. Pertama, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pasangan Agus-Nadia memanfaatkan struktur partai politik untuk membangun politk elektoral yang solid dan efektif dalam Pilkada 2024. Kedua, kajian ini akan mengeksplorasi mekanisme perekrutan yang dilakukan oleh partai-partai pengusung serta bentuk transaksi politik yang muncul diantara pasangan Agus-Nadia dan partai politik selama proses Pilkada. Ketiga, studi ini juga akan mengkaji bagaimana partai politik menjalankan perannya dalam memobilisasi pemilih untuk memenangkan dukungan terhadap pasangan Agus-Nadia.

Studi ini memiliki dua argumen utama yang menjadikannya penting. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori Mesin Politik, khususnya dalam penggunaan partai politik sebagai alat untuk meraih kemenangan dalam Pilkada. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman akademik mengenai transaksi politik antara kandidat dan partai serta peran Politik Patronase dalam menggerakkan dukungan. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana koalisi partai berfungsi sebagai mesin politik dalam Pilkada Temanggung 2024, serta strategi tim pemenangan Agus-Nadia dalam memanfaatkan struktur partai dan dinamika transaksi politik. Analisis ini juga bermanfaat bagi kandidat baru dalam merancang strategi pemenangan Pilkada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pasangan Agus-Nadia mengunakan struktur partai politik sebagai mesin pemenangan dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung?

2. Bagaimana mekanisme perekrutan yang dijalankan oleh partai politik serta bentuk-bentuk transaksi politik yang terjadi antara pasangan Agus-Nadia dengan partai-partai pengusung dalam Pilkada Kabupaten Temanggung 2024?

3. Bagaimana partai politik sebagai mesin politik memobilisasi pemilih untuk memenangkan agus-nadia pada pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pasangan Agus-Nadia memanfaatkan Mesin Politik sebagai pemenangan dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung.

2. Untuk mengkaji Bagaimana Transaksi Politik itu terjadi antara koalisi partai serta Struktur Tim Pemenangan yg dibuat dalam Memenangkan Agus-Nadia pada Pilkada Kabupaten Temanggung 2024.

3. Untuk memahami Tim Pemenangan dalam menggunakan Instrumen Partai Politik dalam membolisasi Pemilih dalam mendukung kemenangan pasangan Agus-Nadia pada Pilkada Kabupaten Temanggung 2024.

D. Manfaat penelitian

1. Teoritis

   Dilihat dari manfaat secara teoritis diharapkan studi ini dapat memperkaya teori Mesin Politik, khususnya dalam hal pemanfaatan partai politik sebagai mesin pemenangan dalam pilkada. penelitian ini juga memperluas kajian akademik mengenai transaksi politik yang terjadi antara kandidat dan partai politik, serta bagaimana Politik Patronase yang digunakan dalam mobilisasi dan dukungan dari partai berperan dalam kemenangan dalam kontestasi politik.

2. Praktis

Secara Manfaat praktis penelitian ini bertujuan untuk bisa memberikan wawasan baru dalam penggunaan instrument partai politik yg dipakai oleh koalisi partai politik sebagai mesin politk untuk menghadapi kontestasi Pilkada Temanggung 2024. Bagaimana Tim Pemenang Agus-Nadia dalam menggunakan Struktur partai politik sebagai tim pemenangan. Tidak Hanya itu, dalam penelitian ini sangat menarik untuk mengetahui bagaimana Transaksi Politik itu terjadi dalam koalisi Partai yang memiliki

ideologi berbeda. Dengan menganalisis bagaimana pasangan Agus-Nadia mengoptimalkan peran partai politik dalam kampanye mereka, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang strategi pemenangan dalam konteks pilkada, khususnya bagi pendatang baru.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian literatur yang sudah dilaksanakan, tujuan dari studi ini dalam rangka mengidentifikasi pola dari berbagai studi sebelumnya serta menganalisis aspek kebaruan yang dapat ditawarkan. Berikut ini adalah tinjauan pustaka yang menjadi dasar penelitian ini.

Studi oleh Haloho (2017) membahas pengaruh hubungan kesetaraan marga atau etnis dalam sistem politik dan jaringannya sebagai mesin politik dalam pemenangan bupati di Toba Samosir pada 2015. Marga, yang berasal dari nama keluarga, digunakan untuk memperkuat ikatan kekerabatan dalam kampanye politik. Penelitian ini menganalisis bagaimana mesin politik memanfaatkan kesamaan marga untuk mendukung pasangan calon Ir. Darwin Siagian dalam Pemilihan Bupati Toba Samosir periode 2015-2020, menggunakan metode kualitatif (Sugiarto, 2014).

Studi yang dilakukan Nugroho (2011) berkaitan dengan dengan dinamika mobilisasi politik dalam pemilu, yang mengkaji bagaimana aktor politik menggunakan berbagai instrumen nonpartai, seperti persona, jaringan kekerabatan, ekonomi, dan sosial, untuk meraih dukungan elektoral. Fokus utama adalah bagaimana partai politik, meskipun masih berperan dalam kontestasi politik, tidak lagi menjadi satu-satunya alat mobilisasi yang efektif. Sebaliknya, aktor politik lebih sering mengeksploitasi elemen-elemen nonpartai, dengan partai hanya menjadi kendaraan untuk kepentingan politik individu, mengingat kelemahan dalam pelembagaan politik partai.

Skripsi yang ditulis oleh Ezyoni (2022) berkaitan dengan Penelitian ini berkaitan dengan praktik patronase politik dalam Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020. Fokus penelitian adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk patronase politik yang

digunakan oleh pasangan calon Hamsuardi dan Risnawanto, yang berhasil memenangkan Pilkada dengan strategi patronase, seperti pembelian suara, pemberian hadiah pribadi, pelayanan, pemberian kelompok, dan proyek gentong babi. Penelitian ini juga mengkaji struktur jaringan broker politik yang terlibat dalam distribusi patronase, termasuk jaringan sosial, politik, tim sukses, serta relawan. Dengan menggunakan teori patronase politik Aspinall, penelitian ini memberikan wawasan mengenai peran patronase dalam mempengaruhi hasil Pemilu lokal.

Studi yang dilakukan oleh Alfaz (2021) Penelitian ini berkaitan dengan praktik politik uang dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Tasikmalaya, dengan fokus pada bentuk dan jaringan patron-klien yang terjadi selama proses pemilu. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa politik uang, seperti vote buying dan pemberian hadiah individual, menjadi praktik yang dominan. Temuan juga menunjukkan bahwa jaringan keluarga dan sosial, melalui tim sukses, berperan penting dalam penyebaran politik uang. Selain itu, praktik tersebut berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan antara Pemilu 2014 dan 2019.

Skripsi yang ditulis oleh Fitriani (2023) Penelitian ini berkaitan dengan dinamika politik dan pertukaran kepentingan antara aktor politik dan partai politik dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Barru. Fokus utama adalah pemanfaatan jaringan politik lokal, khususnya jaringan Suardi Saleh, suami dari Hasnah Syam, dalam memenangkan Pileg 2019 dan bagaimana pertukaran kepentingan antara partai NasDem dan Suardi Saleh dalam Pilkada 2020. Penelitian ini juga mengkaji strategi kampanye, jaringan tim sukses, serta peran organisasi sosial yang digunakan oleh Hasnah Syam untuk memenangkan Pemilu.

Studi yang dilakukan oleh Saputra (2019) Penelitian ini berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh Syahri Mulyo, bupati petahana yang mempunyai status tersangka

tindak pidana korupsi (tipikor), untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Tulungagung 2018. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dari kader PDI-P yang merupakan partai pengusung utama, Syahri Mulyo berhasil terpilih kembali. Studi ini mengungkap penggunaan jaringan klientelisme (disebut "botoh") sebagai strategi utama, yang berfungsi untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat dan membeli suara. Disamping itu, faktor kedekatan emosional dan kinerja Syahri Mulyo turut mendukung keberhasilan strategi ini. Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis fenomena ini.

Studi yang dilakukan oleh Ramadhani (2020) Penelitian ini mengkaji komunikasi politik antara wali kota dan DPRD dalam perumusan APBD Kota Banjarbaru 2019, dengan fokus pada komunikasi informal yang dilakukan oleh wali kota yang terpilih independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali kota lebih sering menggunakan jalur informal, seperti lobi dan negosiasi, untuk menghindari konflik dengan anggota dewan yang memiliki kepentingan politik berbeda. Komunikasi formal hanya dilakukan dalam rapat paripurna. Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga kelancaran proses perumusan anggaran.

Studi yang dilakukan oleh Tinov (2016) Penelitian ini membahas strategi politik partai politik dalam menghadapi kontestasi politik lokal. Fokus utamanya adalah masalah ketidakmampuan partai dalam membangun struktur yang kuat dan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan teori strategi politik Peter Schroder, penelitian ini menyarankan langkah-langkah seperti pemetaan politik, perencanaan, analisis lingkungan, dan mobilisasi untuk meningkatkan efektivitas partai politik dalam kontestasi lokal.

Studi yang dilakukan oleh Lampus (2022) Penelitian ini berkaitan dengan penyebab munculnya politik uang dalam Pemilu di Kecamatan Wanea, terutama di Kelurahan Karombasan Selatan. Tujuannya adalah untuk memahami praktik politik uang yang ada dalam pemilihan umum, seperti pemberian sembako dan uang secara

langsung (vote buying). Studi ini mempergunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa pemberian politik uang diterima dengan baik oleh masyarakat karena dianggap wajar, didukung oleh hubungan antara tim sukses, caleg, dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan politik warga dipengaruhi oleh pemberian politik uang.

Studi yang dilakukan oleh Harjanto (2012) Penelitian ini membahas praktik politik patronase dalam Pemilu 2014 di Jakarta, di mana calon legislatif dan partai politik menggunakan hubungan patron-klien untuk memenangkan pemilu. Praktik ini tidak terkait dengan ideologi partai dan muncul baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Perbedaannya terletak pada pelaku dan sasaran patronase.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada masalah dinamis dan sosial, dengan demikian peneliti memilih memakai metode kualitatif dalam penentuan cara dalam pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Pendekatan kualitatif ini berguna untuk memahami interaksi sosial, misalnya melalui wawancara mendalam, untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul.

1. Lokasi penelitian

Peneliti melaksanakan studi di Kabupaten Temanggung dengan objek penelitian Agus Setyawan dan Nadia Muna yang merupakan kandidat dalam pemilihan Bupati Kabupaten Temanggung tahun 2024, tentang bagaimana Agus-Nadia mengunakan partai politiknya sebagai mesin politnya untuk memenangkan Pilkada Temanggung 2024.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi yang dilaksanakan ini berjenis penelitian lapangan dengan memakai metode penelitian kualitatif. Merujuk paparan (Creswell, 2012) makna dari penelitian kualitatif yakni metode yang dipergunakan dalam memahami dan mengekplorasi makna yang oleh sekelompok orang atau sejumlah individu disebut berasal dari permasalahan

kemanusiaan ataupun sosial. Proses penelitian kualitatif tersebut menyertakan banyak langkah penting, misalnya pengajuan prosedur-prosedur dan pertanyaan-pertanyaan, melaksanakan pengumpulan data yang spesifik dari partisipan, menafsirkan makna sekaligus menganalisi makna data. Laporan akhir bagi studi ini mempunyai kerangka ataupun struktur yang fleksibel. Semua orang yang turut serta berbentuk penelitian ini perlu mengaplikasikan pandangan penelitian dengan gaya induktif, mempunyai fokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas sebuah persoalan (Creswell, 2012).

Sehubungan dengan dengan judul penelian penulis yang diusulkan, maka berikutnya yang dilaksanakan penulis yakni menemukan fenomena pasangan Agus-Nadia dalam memakai partai politik untuk dijadikan mesin politik sebagai mobilisasi pemilih di pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung. Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan naratif merujuk paparan Clandinin & Connelly (2000:21) yakni strategi penelitian yang mana peneliti didalamnya akan melaksanakan pengamatan kehidupan individu-individu dan meminta sekelompok individu ataupun seseorang agar bisa diperoleh data. Informasi yang diperoleh oleh penulis, lalu dituangkan menjadi bahan penelitian untuk dikaji dari segi sosilogis. Lalu pada tahap akhir, peneliti menggabungkan data yang sudah didapatkan dari hasil penelitian dengan bentuk naratif.

3. Sumber Data Penelitian

Terkait dengan penelitian kualitatif, pengumpulan data biasanya dilaksanakan dari berbagai sumber, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi, dibandingkan hanya mengandalkan satu sumber data saja (Creswell, 2012). Sehubungan dengan sumber data yang dipergunakan yakni:

a. Data Primer

Didefinisikan data primer sebagai data utama untuk sebuah penelitian. Peneliti memerlukan data sebagai bukti atas fakta di lapangan. Data ini dimunculkan langsung dari lokasi penelitian melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan. Peneliti terjun di masyarakat agar data bisa dikumpulkan dengan beragam bentuk, misalnya foto-foto, rekaman wawancara di lapangan. Melalui wawancara dengan beragam sumber, peneliti memperoleh informasi, misalnya tanggapan tokoh masyarakat dan masyarakat umum terhadap fenomena politik yang terjadi selama pemilihan kepala daerah di Kabupaten Temanggung.

b. Data Sekunder

Didefinisikan data Sekunder sebagai data yang mampu menunjang penelitian. Sehubungan dengan studi yang dilaksanakan peneliti juga melaksanakan telaah pustaka, yang mana data kajian yang pernah ada kemudian dikumpulkan peneliti. Data yang dimaksudkan bisa bersumber dari jurnal, buku dan beragam sumber informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan sejumlah teknik untuk mengumpulkan data penelitian, mencakup:

a. Wawancara mendalam (Interview)

Wawancara merupaka percakapan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan pengajuan sejumlah pertanyaan dan yang diwawancarai memunculkan sumber informasi yang lain sehubungan dengan permasalahan dari studi yang dilaksanakan. memberikan jawaban. Sehingga wawancara yag dihasilkan bisa terekam sebaik mungkin, karenanya dibutuhkan alat bantu untuk melaksanakan wawancara itu, misalnya alat perekam sebagai perekam percakapan dengan informan, disamping itu peneliti juga mempergunakan catatan lapangan agar bisa dicatat poin-poin penting didalamnya (ini sepanjang proses

wawancara). Studi yang dilaksanakan ini mengambil data primer dari wawancara yang sudah dilaksanakan terhadap komponen masyarakat.

Beragam komponen masyarakat yang dimaksudkan yakni informan yang terpilih dengan kesengajaan agar bisa diwawancarai dan memahami permasalahan yang tengah dikaji. Informan yang terpilih untuk diwawancarai secara mendalam sehubungan dengan pengumpulan data ini mencakup;

1. Pasangan Agus-nadia
2. Ketua DPC PDIP Kabupaten Temanggung
3. Ketua DPC PPP Kabupaten Temanggung
4. Relawan atau tim Pemenangan Agus-Nadia
5. Pemilih atau Warga yang terlibat dalam kampanye

b. Dokumen/ arsip/ literatur/hasil penelitian sebelumnya.

Teknik ini adalah metode mengumpulkan arsip atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, yang merupakan sumber penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud meliputi dokumen tertulis yang didapat melalui media elektronik (internet), media cetak, data statistik, beragam tulisan ilmiah dan laporan penelitian sebelumnya, yang seluruhnya kemudian dijadikan dokumen penting yang sudah ditelusuri demi menambah data penelitian yang akan dipergunakan. Fungsi dari data ini yakni menjadi bukti pendukung atas hasil wawancara yang sudah dilaksanakan.

c. Penelusuran data online

Data yang diperoleh melalui internet atau media online lainnya memberikan fasilitas yang memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi, baik berwujud teori

ataupun data, dengan cepat dan mudah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

5.Teknik Analisis Data

Metode analisis data yakni sebuah pendekatan untuk pengolahan data penelitian menjadi informasi yang berguna sebagai dasar untuk pengembangan hasil data tersebut. Oleh karena itu, teknik analisis yang dipergunakan untuk penelitian ini sifatnya deskriptif, yang memberikan gambaran umum dari hasil proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang mencakup langkah mengumpulkan data, mereduksi data, hingga data bisa disajikan dan dikumpulkan(Creswell, 2012)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian adalah proses pencarian data lapangan yang dimaksudkan dalam rangka memperoleh informasi guna menjadi jawaban berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyaringan dan penyederhanaan data mentah yang dimunculkan dari catatan lapangan. Proses ini bertujuan untuk memilah data yang relevan dengan penelitian serta mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Dengan demikian, reduksi data membantu dalam memperoleh informasi yang lebih jelas dan signifikan, sehingga mempermudah proses penarikan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai proses mengemas data agar lebih mudah dipahami, dengan menyesuaikannya berdasarkan tujuan analisis yang ingin dicapai. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk laporan yang dianalisis secara deskriptif, analitis, dan logis, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas.

d. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah proses untuk memahami, mengidentifikasi pola, serta menjelaskan hubungan sebab akibat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik secara induktif, yaitu dengan menggeneralisasi dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pemahaman yang lebih umum(Creswell, 2012)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah struktur yang digunakan dalam penyusunan rencana penelitian sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memahami pokok permasalahan yang diteliti serta mempermudah proses pencarian data penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu: Bab I membahas pendahuluan, Bab II menjelaskan kerangka teori, Bab III menguraikan gambaran wilayah atau lokasi penelitian, Bab IV dan Bab V membahas pertanyaan penelitian, serta Bab VI berisi penutup atau kesimpulan dari hasil penelitian.

- **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang yang menjabarkan dasar permasalahan penelitian yang hendak dipaparkan untuk pembaca. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan utama dalam penelitian ini, serta tujuan penelitian yang menguraikan maksud dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, bab ini juga mencakup manfaat penelitian yang menjelaskan kegunaan dari hasil penelitian. Bagian ini turut memuat tinjauan pustaka yang mengacu pada berbagai kajian relevan dengan penelitian ini, serta kerangka teori yang menjadi landasan dalam menganalisis persoalan yang dikaji. Sehubungan dengan metode penelitian, penulis menguraikan secara rinci pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber dan jenis data, serta teknik analisis data. Selain itu, dijelaskan pula konsep dan definisi teori yang digunakan, sehingga skripsi ini dapat tersusun secara sistematis dan komprehensif.

- **BAB II**

Kerangka Teori

Untuk bab ini, penulis menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teori yang dibahas mencakup partai politik, mesin politik (political machine), dan patronase politik, yang berfungsi sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis hasil penelitian yang diperoleh.

• BAB III Landscape Kabupaten Temanggung dan Profil Kandidat

Bab ini menguraikan gambaran umum Kabupaten Temanggung, mencakup kondisi geografis, topografis, serta aspek administratif wilayah. Selain itu, dibahas pula kondisi demografis yang meliputi struktur sosial dan budaya, aspek ekonomi, serta dinamika politik di Temanggung. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan profil kandidat, termasuk latar belakang pendidikan serta perjalanan karier politiknya di Temanggung hingga dikenal luas oleh masyarakat.

- **BAB IV: Penggunaan Struktur Partai Politik Sebagai Mesin Pemenangan Oleh Pasangan Agus-Nadia Dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Mesin Politik Sebagai alat memobilisasi pemilih dan bagaimana struktur partai koalisi dalam membentuk tim pemenangan, serta apa saja transaksi politik yang disepakati antara koalisi partai dalam mengusung Agus-Nadia dalam Pilkada Kabupaten Temanggung.

• BAB V: Proses Perekrutan dan Transaksi Politik Pada Pilkada Kabupaten Temanggung

Pada bab ini, akan dijelaskan temuan utama terkait proses perekrutan yang dilaksanakan oleh partai politik serta bentuk transaksi politik yang terjalin antara pasangan Agus-Nadia dengan partai politik.

• BAB VI: Partai Politik Sebagai Mesin Politik Dalam Memobilisasi Pemilih Untuk Memenangkan Pasangan Agus-Nadia Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung

Pada bab ini akan dijelaskan temuan utama terkait peran partai politik sebagai mesin politik dalam memobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan Agus-Nadia pada Pilkada Temanggung 2024.

- **BAB VII: Penutup**

Bab ini berisi rangkuman dari hasil-hasil data yang diperoleh selama penelitian, yang disusun oleh penulis. Selain itu, kesimpulan ini juga mencakup saran-saran untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

BAB II

Kerangka Teori

A. Definisi Konseptual

1. Partai Politik

Partai politik didirikan dengan tujuan mewadahi kesamaan pandangan, nilai, dan tujuan dari kelompok tertentu yang terikat oleh sebuah ideologi. Saat ini, partai politik termask bagian instrumen bagi warga negara dalam meraih kekuasaan. Merujuk paparan Miriam Budiardjo (2008: 403-404), partai politik sebagai organisasi yang beranggotakan individu-individu dengan kesamaan visi, nilai, serta tujuan, yang berupaya mendapat posisi politik dan kekuasaan secara konstitusional guna merealisasikan program-program yang ada. Sehubungan dengan hal ini, partai politik berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat dalam kompetisi politik. Para ilmuwan sudah mengemukakan beragam definisi sehubungan dengan politik, diantaranya yakni peran partai politik menjadi wadah untuk warga negara dalam upaya memperoleh kekuasaan (Budiarjo, 1998)

Merujuk paparan Miriam Budiardjo pada buku yang ditulisnya "Dasar-Dasar Ilmu Politik," partai politik berarti sebuah kelompok dibawah organisasi tertentu secara teratur, di mana para anggota didalamnya mempunyai kesamaan cita-cita, nilai, dan pandangan. Tujuan dari kelompok ini yakni agar bisa mendapat kekuasaan politik serta menempati posisi dalam pemerintahan lewat cara-cara yang sejalan dengan konstitusi, agar dapat mengimplementasikan kebijakan yang diusung. Untuk itu, partai politik berperan sebagai wadah bagi individu-individu yang mempunyai misi dan visi yang sesuai agar bisa memperjuangkan kepentingan serta aspirasinya untuk sistem pemerintahan, dengan tetap menjalankan prosedur dan aturan yang berlaku(Budiarjo, 1998)

Merujuk paparan Carl J. Friedrich, partai politik adalah suatu kelompok individu yang terorganisir secara stabil dan mempunyai tujuan utama memperoleh

ataupun menjaga kendali atas pemerintahan bagi para pemimpin. Lewat dominasi ini, partai politik berusaha menebar manfaat, baik dalam bentuk material ataupun ideologis, kepada para anggota didalamnya. Friedrich menekankan partai politik terdiri dari individu-individu yang terstruktur secara sistematis, berdasarkan kesamaan ideologi atau faktor lain yang menyatukan mereka. Mereka bekerja sama dengan tujuan tertentu, seperti mempertahankan atau merebut kekuasaan dalam pemerintahan. Sehubungan dengan hal itu, partai politik berfungsi sebagai wadah bagi individu-individu yang mempunyai misi dan visi sejalan untuk memperjuangkan kepentingan serta aspirasinya untuk ranah pemerintahan, dengan sasaran utama memperoleh atau mempertahankan kekuasaan politik(Soelistyati & Ghani, 1989). Selanjutnya merujuk paparan Sigmund Neumann, partai politik merupakan organisasi yang bertujuan memposisikan anggotanya dalam posisi kekuasaan di pemerintahan serta meraih dukungan masyarakat dengan bersaing melawan kelompok lain yang mempunyai pandangan politik berlainan.

Sehubungan dengan sistem politik Indonesia, partai politik menjalankan fungsi dan peranan yang krusial. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia untuk memperjuangkan serta menyuarakan kepentingan politik anggotanya. Selain itu, partai politik di Indonesia beroperasi pada tingkat nasional dan didirikan berdasarkan kesamaan visi, misi, serta cita-cita guna memperjuangkan kepentingan politik anggota, negara, bangsa, dan masyarakat luas. Peranan partai politik juga dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

UU ini juga membahas fungsi partai politik, memberi penegasan perannya yang krusial untuk sistem politik Indonesia. Partai politik memiliki tugas utama untuk mewakili serta memperjuangkan kepentingan politik anggotanya, negara, bangsa, dan masyarakat luas, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI berdasarkan prinsip

Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, partai politik menjadi instrumen penting untuk demokrasi Indonesia, berperan sebagai wadah aspirasi politik rakyat serta penghubung diantara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, partai politik menjalankan tanggung jawab dalam memelihara keutuhan bangsa dan negara menyesuaikan dengan konstitusi sekaligus ideologi yang berlaku.

a. Bertujuan dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat umum serta anggota didalamnya, dengan demikian mereka bisa menjadi warga negara yang memahami serta menjalankan kewajiban sekaligus hak mereka bagi kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa.

b. Bertujuan menjadi tempat untuk memunculkan lingkungan yang mendukung bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang bermaksud membuat kesejahteraan masyarakat meningkat.

c. Bertujuan untuk sarana menghimpun, menyerap, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat terkait dengan penetapan dan perumusan kebijakan negara.

d. Menjalankan peranan sebagai partisipasi politik untuk warga negara Indonesia pada proses bernegara.

e. Berperan sebagai sarana rekrutmen politik dengan menjalankan proses pengisian jabatan secara demokratis serta merekrut anggota partai secara terbuka, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Agar partai politik bisa dipahami secara komprehensif, perlu diperhatikan beragam fungsi yang saling terkait dan tidak mampu terpisah satu dengan lainnya. Dalton dan Martin P. Wattenberg, sebagaimana hasil kutipan dari Sigit Pamungkas

(2011:15-20), menguraikan sejumlah fungsi partai politik atas dasar aspek-aspek tertentu.

B. Landasan teori

Mesin Politik (Political Machine)

Para politikus sering memanfaatkan istilah mesin politik yang mengarah pada peranan organisasi untuk penggalangan dukungan, pemilihan umum, dan kampanye. Organisasi ini terbagi atas dua jenis, yaitu institusional seperti partai politik, serta bersifat adhoc seperti teman, relawan, tim sukses, dan keluarga(Aspinall, 2022). Mesin politik secara umum merupakan organisasi politik yang terstruktur secara disiplin, di mana seorang pemimpin atau kelompok kecil dengan sifat otoriter mengendalikan dukungan dari para pendukung dan pelaku bisnis, yang umumnya terdiri dari pekerja kampanye, dengan memberikan imbalan atas kontribusi mereka. Mesin politik tersebut berperan penting untuk kandidat agar bisa mendapat dukungan pemilih. Untuk memperkuat mesin politiknya, kandidat sering kali menawarkan imbalan kepada mereka yang terlibat, guna menjaga hubungan dan memastikan perolehan suara sesuai harapan. Namun, hubungan antara kandidat dan mesin politiknya tidak selalu didasarkan pada imbalan, tetapi juga dapat terbentuk atas dasar kepercayaan yang dimiliki pemilih atau pendukung terhadap kandidat yang mereka dukung (Candra, 2014).

Relasi yang muncul bukan sekadar ditemukan diantara pendukung atau kandidat, namun bisa muncul diantara sesama pendukung, mencakup dari kedua jenis mesin politik yang berlainan. Relasi ini bisa muncul merujuk pada kepentingan bersama agar kandidat yang mereka dukung bisa menang. Pola hubungan tersebut bisa muncul dengan atau tanpa kesengajaan. Namun, tujuan utama dari keterkaitan antara kedua mesin politik ini yakni bekerja sama untuk mencapai kemenangan kandidat dalam pemilu (Efriza, 2016).

Seorang kandidat atau politisi dalam menghadapi pemilu harus mempersiapkan mesin politiknya sejak jauh hari. Hal ini mencakup membangun elemen-elemen penting, seperti merekrut individu yang dianggap kompeten untuk menggerakkan mesin politik, merancang strategi serta rencana yang akan dijalankan, dan membagi tugas bagi setiap elemen yang terlibat dalam operasional mesin politik tersebut. Agar mesin politik bisa dikendalikan, seorang politisi perlu mempunyai karakter yang karismatik dan tegas, mampu membimbing serta memberikan manfaat baik secara non-materiil ataupun materiil, serta mempunyai misi dan visi yang selaras dengan para pendukungnya (Ishak, 2010).

Ada masa seorang politisi atau kandidat hanya mengandalkan satu jenis mesin politik dalam upaya memenangkan pemilu. Bisa jadi hanya partai politik yang berperan aktif dalam pemenangan, atau sebaliknya, hanya tim sukses yang bersifat ad hoc dan sementara yang bekerja. Seperti yang dijelaskan oleh (Aspinall & Berenshcot, 2019) dalam bukunya Democracy for Sale: Klientelisme, Pemilihan Umum, dan Negara di Indonesia, di Indonesia, para politisi cenderung lebih menyesuaikan pada struktur mesin politik yang sifatnya ad hoc dan personal, disebut sebagai "tim sukses," dibandingkan pada partai politik. Koneksi personal, baik melalui hubungan kekerabatan, pertemanan, jaringan bisnis, agama, maupun kesamaan suku, lebih dominan dibandingkan loyalitas terhadap partai politik.

Sesuai yang dilaksanakan seorang ketua RW (Rukun Warga) disuatu kawasan industri di Kota Tanggerang, yang sebelu pemilu legislatif 2014 menjalin kesepakatan dengan warga agar bisa menyatukan pilihan demi mendapatkan manfaat bagi kelompok mereka. Dari sejumlah calon legislatif yang diajak bernegosiasi, kemudian Abdullah menemukan satu calon yang mau memberikan sumbangan sebesar Rp50.000.000 untuk biaya pengaspalan jalan di lingkungan mereka. Sebagai bentuk timbal balik, Abdullah dan rekan-rekannya membentuk tim sukses guna menggalang dukungan bagi calon tersebut. Bahkan, anggota tim diberikan tugas untuk menghalangi

calon lain mendekati warga dan mencegah pembelian suara di lingkungan mereka (Aspinall & Berenshcot, 2019).

C. Kerangka berpikir

Patronase

Patronase dan klientelisme adalah dua konsep yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan, meskipun beberapa ahli, seperti Kitschelt & Wilkinson (2007), menganggap keduanya serupa. Patronase merujuk pada distribusi sumber daya material yang diberikan untuk kepentingan tertentu dalam rangka mencapai tujuan politik. Umumnya, sumber daya ini berasal dari dana publik, meskipun tidak selalu demikian. Definisi ini merupakan penyempurnaan dari konsep patronase yang telah dirumuskan sebelumnya, termasuk oleh Shefter (1994, 283). "Patronase menyertakan pertukaran keuntungan publik bagi keuntungan partai maupun dukungan politik," dan kemudian didistribusikan para politisi kepada "pekerja kampanye, pemilih individu, atau kontributor" (Aspinall, 2022)

Untuk itu patronase sebagai pemberian uang tunai, jasa, barang, dan keuntungan ekonomi yang lain misalnya kontrak proyek ataupun peluang pekerjaan yang diberikan oleh politisi, mencakup keuntungan yang diberikan bagi individu (contohnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada komunitas atau kelompok (contohnya, lapangan sepak bola baru bagi para pemuda di kampung). Patronase juga dapat berwujud barang atau uang tunai yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (contohnya, sehubungan dengan pembelian suara) atau dari dana publik (contohnya, proyek-proyek pork barrel hasil pembiayaan dari pemerintah) (Aspinal & Sukmajati, 2015)

Sebaliknya, klientelisme merujuk pada hubungan kekuasaan yang bersifat personalistik. Dalam pengertiannya yang klasik, individu dengan status sosial lebih tinggi (patron) menjalin hubungan timbal balik dengan mereka yang berada pada status sosial lebih rendah (klien). Hubungan ini bersifat langsung, berlangsung dalam jangka

panjang, serta dapat berubah dalam hal isi, tujuan, dan arah seiring waktu. Senada dengan paparan (Apriani & Maharani, 2019a) "Terdapat ketidakseimbangan untuk pertukaran antara kedua pasangan yang memperlihatkan kekayaan, kekuasaan, dan status relatif yang berbeda." Dengan demikian umumnya, hubungan klientelis ini mempunyai hierarkis dan menyertakan interaksi pribadi yang berkelanjutan dan berulang di mana perilaku tiap pihak saling menyesuaikan dengan pihak lainnya (Aspinall, 2022) (Hicken 2011). Lebih mendalam klientalisme dan patronase digolongkan atas. Patronase megarah pada beragam keuntungan termasuk materi yang akan terdistribusi oleh politisi kepada pendukung maupun pemilih. Sebaliknya klientalisme mengarah pada karakter relasi diantara pendukung atau pemilih dan politisi (Aspinal & Sukmajati, 2015).

Modifikasi definisi patronase mencakup 3 hal, Pertama, patronase umumnya bersumber dari dana publik, namun tidak selalu demikian. Sumber daya ini juga dapat berasal dari sektor swasta, seperti ketika politisi menggunakan kekayaan pribadi, memanfaatkan dana dari aktivitas ilegal, atau menerima sumbangan dari pengusaha dan perusahaan untuk mendukung distribusi patronase. Untuk yang paling jelas contohnya yakni saat politisi memberikan hadiah ataupun uang tunai kepada pemilih sebagai pemberian pribadi, meskipun dana tersebut sebenarnya berasal dari hasil korupsi di lembaga pemerintahan. Kedua, distribusi patronase bukan sekadar diberikan kepada individu, namun juga untuk kelompok masyarakat oleh politisi, mesin politik, atau partainya. Ketiga, patronase tidak terbatas pada masa kampanye, melainkan didistribusikan di semua tingkatan pemerintahan, baik nasional maupun subnasional, dan berlangsung sepanjang siklus pemilu, mulai dari berakhirnya pemilu sebelumnya hingga pemilu berikutnya (Aspinall, 2022).

Terdapat juga tiga tipe utama patronase (tentunya berawal dari Hutchcroft 2014b juga). Pertama, Mikro partikularisme merujuk pada penyaluran manfaat langsung kepada individu atau rumah tangga. Misal praktik pembelian suara atau

pemberian posisi di sektor publik demi keuntungan politik, terutama untuk pekerjaan dengan keterampilan rendah yang memberikan keuntungan bagi kelompok partisan (Apriani & Maharani, 2019b) Dalam skala yang lebih besar, mikro partikularisme dapat melibatkan alokasi dana pembangunan daerah pemilihan yang diberikan kepada anggota parlemen berdasarkan hubungan khusus mereka dengan pemimpin partai atau pemerintah. Jenis partikularisme ini juga dapat disebut sebagai patronase personalistik, karena umumnya melibatkan interaksi langsung antara pemberi dan penerima manfaat (Aspinall, 2022)

Kedua, meso partikularisme merupakan merujuk pada distribusi manfaat kepada kelompok yang lebih besar, baik berdasarkan wilayah geografis (seperti desa atau distrik), keanggotaan dalam asosiasi (seperti komunitas keagamaan lokal), maupun sektor tertentu (seperti serikat pekerja atau organisasi profesi). Manfaat materi yang diberikan dapat berupa proyek infrastruktur skala kecil hingga menengah, atau penyediaan peralatan bagi klub dan organisasi. Tidak seperti mikro-partikularisme, meso-partikularisme tidak selalu bergantung pada hubungan personal antara pemberi dan penerima. Jenis partikularisme ini lebih berkaitan dengan barang kolektif atau barang publik lokal yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dalam suatu kelompok, bukan secara individu. Barang kolektif ini eksklusif bagi anggota komunitas tertentu namun tidak tersedia bagi mereka di luar kelompok tersebut. Contohnya termasuk pembangunan jalan lokal, renovasi sekolah, serta berbagai proyek infrastruktur yang diperuntukkan bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu (Aspinall, 2022) (Magaloni 2006; Kitschelt dan Wikinson 2007; Diaz-Cayeros dkk., 2016).

Ketiga, makro partikularisme merujuk pada pemanfaatan program tingkatan nasional atau regional yang dimanipulasi oleh partai atau politisi demi kepentingan politik. Dalam situasi ini, penerima manfaat tampak dipilih berdasarkan kriteria programatik dan universal, seperti bantuan tunai bagi keluarga miskin, pensiun bagi

lansia, atau beasiswa bagi siswa berprestasi dalam ujian masuk universitas. Namun, pada praktiknya, politisi sering kali melakukan intervensi untuk mengarahkan manfaat tersebut kepada pendukung mereka. Makro-partikularisme terbagi ke dalam tiga subkategori, salah satunya adalah pengklaiman kredit, di mana politisi atau partai berupaya meyakinkan pemilih bahwa mereka mempunyai tanggung jawab atas akses penerima terhadap program daerah atau nasional. Meskipun dalam kenyataannya, program tersebut dijalankan tanpa adanya diskresi di luar birokrasi. Subkategori kedua adalah fasilitasi, yang merujuk pada bantuan yang diberikan kepada konstituen untuk memperoleh akses ke program yang secara formal sudah memenuhi syarat bagi mereka. Fasilitasi sering kali berbentuk layanan konstituen yang bersifat terbuka, seperti ketika legislator nasional membantu pemerintah daerah dalam mengajukan permohonan ke lembaga pemerintah untuk mendukung program transportasi, kesehatan, atau lingkungan hidup. Tetapi, dalam beberapa kasus, fasilitasi juga dapat melibatkan proses birokrasi tertentu (Surahmadi, 2016).

Ketiga morselisasi, Makro partikularisme juga terjadi saat legislator membagi program provinsi atau nasional menjadi beberapa bagian dan menggunakan kewenangan mereka untuk menyalurkan manfaat demi kepentingan politik atau elektoral. Misalnya, seorang politisi yang memperoleh akses terhadap kartu asuransi kesehatan atau beasiswa, kemudian membagikannya kepada pendukung partainya. Atau saat ia melaksanakan intervensi untuk proses penganggaran untuk mengarahkan bantuan rehabilitasi sekolah ke daerah pemilihannya sendiri. Dampaknya, tindakan ini dapat mengubah program regional atau nasional menjadi bentuk patronase mikro atau meso. Namun, karena sumber utama manfaat tersebut berasal dari program yang luas dan umumnya dialokasikan berdasarkan kriteria nonpolitik, dengan hanya sedikit diskresi dalam penyalurannya, maka keseluruhan praktik ini tetap dikategorikan sebagai makro partikularisme (Suryadi, 2006).

Berikutnya, akan diberikan ilustrasi perbandingan tingkatan meso partikularisme dan patronase mikro di 3 negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia,

Filipina, dan Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pola distribusi patronase mengalami perubahan sepanjang siklus pemilu. Perubahan tersebut akan dikaji lebih dalam melalui grafik yang disajikan di bawah ini (Aspinall, 2022).

Berdasarkan grafik di atas, terdapat perbedaan dalam siklus pemilu, dengan Indonesia menunjukkan tingkat tertinggi dan Malaysia terendah. Sementara itu, di Filipina, klientelisme pemilu dan akses terhadap sumber daya bagi meso partikularisme menyesuaikan pola siklus pemilu yang lebih jelas dalam mikro partikularisme dibandingkan meso partikularisme. Secara keseluruhan, variasi dalam pola mobilisasi jaringan berkaitan dengan perbedaan dalam bentuk dan distribusi patronase, yang dinamakan rezim mobilisasi elektoral (Hidayat, 2018)

Melihat patronase dari 3 negara di Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, dan Indonesia terdapat variasi dalam penerapannya. Di Filipina, mikro partikularisme mendominasi, sementara meso partikularisme juga cukup signifikan melalui berbagai proyek kreatif yang beragam (Holmes 2019). Selain itu, terdapat banyak peluang bagi politisi untuk mengklaim penghargaan serta memperoleh keuntungan dari program nasional. Sementara itu, di Malaysia, politik patronase lebih berfokus pada "pembajakan" program publik di tingkat makro. Dalam waktu bertahun-tahun, pemerintahan yang dipimpin oleh Barisan Nasional menjaga dominasinya dengan mengeluarkan berbagai program nasional yang memunculkan manfaat bagi pendukung inti yang ada, terutama kelompok Melayu. Para penerima manfaat diberikan pemahaman bahwa keberlanjutan bantuan tersebut bergantung pada dukungan politik mereka terhadap Barisan Nasional (Aspinall, 2022)

Di Indonesia, patronase cenderung menggabungkan pola mikro dan meso, di mana calon pejabat politik sering menggunakan dana pribadi untuk proyek infrastruktur kecil dan bantuan bagi komunitas serta individu. Beberapa politisi, terutama kepala daerah dan anggota legislatif, dapat memanfaatkan sumber daya negara untuk patronase mereka, meskipun akses terhadap dana publik masih terbatas

oleh kendali birokrasi. Akibatnya, banyak politisi yang mengandalkan sumber daya pribadi dan cenderung membatasi distribusi manfaat pada masa pemilu (Aspinall, 2010).

Rezim mobilisasi politik berbeda di Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Malaysia didominasi oleh mesin berbasis partai dengan patronase makro dan meso yang bersumber dari dana publik serta didistribusikan di luar pemilu. Filipina lebih mengandalkan mesin politik lokal dengan patronase mikro, meso, dan makro yang berlangsung sepanjang siklus pemilu, didanai dari sumber publik dan swasta. Sementara itu, Indonesia lebih banyak menggunakan tim ad hoc, dengan patronase mikro dan meso yang terkonsentrasi pada pemilu serta lebih bergantung pada dana swasta (Aspinall, et al., 2022 pp. 12-13).

Mesin politik berbasis partai yang kuat, khususnya yang mendominasi pemerintahan nasional selama puluhan tahun seperti di Malaysia, memiliki akses luas terhadap sumber daya dan program negara. Dominasi ini memberikan keuntungan dalam makro-partikularisme, di mana politisi partai berkuasa dapat dengan mudah memanfaatkan program negara untuk kepentingan elektoral. Kandidat politik yang maju di bawah partai pemerintah lebih berfokus pada klaim kredit atau fasilitasi akses terhadap program negara, sehingga mikro-partikularisme jarang terjadi. Sebaliknya, di negara dengan dominasi mesin lokal atau tim ad hoc, koordinasi antara politisi lokal dan nasional cenderung lebih lemah. Tidak ada mekanisme yang mampu menyaingi konsistensi penyampaian program nasional oleh partai atau koalisi nasional yang memegang kontrol kuat atas pemerintahan, misalnya di Malaysia. Akibatnya, negara-negara dengan sistem politik yang kurang terstruktur cenderung lebih bergantung pada distribusi patronase dibandingkan dengan kebijakan berbasis program (Aspinall, et al., 2022 p. 14).

Tetapi masih ada hal penting yang berbeda dalam cara mesin lokal dan tim ad hoc terkait penerapan patronase. Terkait kasus Filipina, fakta yakni mesin-mesin di

tingkat lokal yang sering kali dikuasai oleh keluarga tertentu dapat mengendalikan institusi pemerintahan daerah selama bertahun-tahun, menempatkan mereka dalam struktur kekuasaan lokal. Dominasi ini memberi mereka akses luas terhadap program pemerintah pusat, memungkinkan mereka memunculkan hubungan jangka panjang dengan perantara dan pemilih, serta menyalurkan manfaat secara berkelanjutan, bahkan di luar periode pemilu. Sementara itu, di Indonesia, tim pialang politik umumnya bersifat sementara dengan hubungan jangka pendek, sehingga distribusi patronase kepada pemilih cenderung hanya terjadi saat pemilu berlangsung (Aspinall, et al., 2022 pp. 14-15).

Ketika tahapan awal perkembangan negara modern, ketika satu partai berhasil memonopoli sumber daya, menguasai pemerintahan pusat, dan membangun jaringan sendiri untuk menggerakkan pemilih, mereka bisa mengedepankan klaim kredit dalam makro-partikularisme guna memperoleh dukungan. Pola ini terlihat di Malaysia, di mana sebuah partai—meskipun secara teknis merupakan koalisi terdaftar sebagai satu entitas dan mampu mengamankan otoritas pemerintahan sejak awal transisi menuju kemerdekaan. Akses menuju sumber daya pemerintah didominasi oleh partai patronase terpusat, yang berikutnya dimiliki oleh kandidat politik sedikit insentif (bila bersumber dari koalisi pemerintah) atau peluang (saat berasal dari partai oposisi) sebagai investasi berwujud patronase swasta (Aspinall, Weiss, Hicken, & Hutchcroft, 2022, p. 16). Sebaliknya, baik di Indonesia ataupun Filipina, faktor sejarah dan kelembagaan berperan dalam membentuk pola distribusi patronase yang sangat berlainan. Di Filipina, dominasi mesin politik lokal semakin menguat sejak awal abad ke-20, ketika pemerintah kolonial AS lebih fokus pada pembentukan jabatan-jabatan politik di tingkat lokal daripada membangun birokrasi nasional yang kuat. Hal ini kemudian diikuti dengan pemilihan majelis nasional secara penuh dan akhirnya Senat. Terbatasanya hak pilih serta akses terhadap sumber daya memungkinkan elit pemilik tanah di tingkat lokal dalam mendapat kekuasaan politik, memberi mereka pengaruh

besar atas pengangkatan birokrasi, alokasi sumber daya, pinjaman dari bank milik negara, dan berbagai keuntungan lainnya (Aspinall, et al., 2022 p. 16).

BAB III

LANDSCAPE KABUPATEN TEMANGGUNG DAN DINAMIKA PILKADA 2024

Pada bab ini penulis memberikan gambaran landscape kabupaten Temanggung dilihat dari kondisi geografi, Demografis, kondisi sosial, ekonomi dan budaya Kabupaten temanggung. Selain itu juga akan dijelaskan sejarah Kabupaten Temanggung, profil kandidat, dan dinamika Pilkada yang terjadi di Kabupaten Temanggung tahun 2024.

A. Gambaran Umum Kabupaten Temanggung

1. Kondisi Geografis dan batas Administrasi

Kabupaten Temanggung merupaan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak pada koordinat antara 110°18' – 110°42' Bujur Timur dan antara 7°03' – 7°27' Lintang Selatan. Lokasinya yang berada di dataran tinggi pegunungan menjadikan Temanggung memiliki lanskap yang khas berupa perbukitan dan lereng gunung, dengan kontur wilayah yang umumnya bergelombang hingga berbukit curam. Secara topografis, wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian antara 500 meter hingga lebih dari 1.450 meter di atas permukaan laut (mdpl). Di bagian barat dan barat laut, wilayah ini berbatasan langsung dengan dua gunung berapi aktif, yaitu Gunung Sindoro (3.150 mdpl) dan Gunung Sumbing (3.371 mdpl), yang sekaligus menjadi penanda penting secara geografis dan kultural. Selain memberikan keindahan alam, keberadaan kedua gunung tersebut juga mempengaruhi kesuburan tanah serta pola iklim mikro setempat.

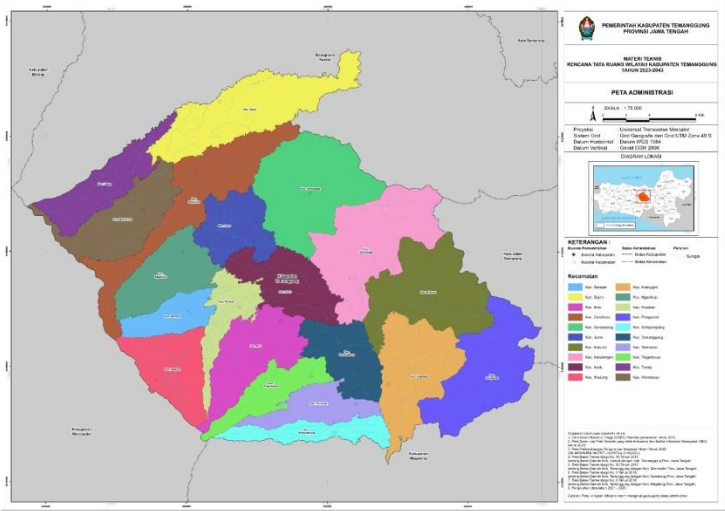
Kabupaten Temanggung memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.000–3.000 mm per tahun, dengan suhu udara harian berkisar antara 18°C hingga 28°C, bergantung pada ketinggian wilayah. Kelembaban udara yang relatif tinggi serta variasi

suhu yang tidak ekstrem menjadikan Temanggung sebagai daerah yang sangat mendukung aktivitas pertanian, khususnya tanaman hortikultura, tembakau, dan kopi. Dari sisi administratif, Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah sekitar 870,65 km². Secara administratif, wilayah ini terbagi menjadi 20 kecamatan, yang terdiri dari 266 desa dan 23 kelurahan. Ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Temanggung, yang juga menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi utama. Struktur administratif kabupaten ini dikelola berdasarkan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara: berbatasan dengan Kabupaten Kendal
- Sebelah timur: berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang
- Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo

Letak geografis Kabupaten Temanggung yang berada di tengah-tengah wilayah Jawa Tengah menjadikannya sebagai daerah strategis, khususnya dalam jalur penghubung antara wilayah barat dan timur Jawa Tengah. Aksesibilitas yang baik serta kedekatannya dengan pusat-pusat ekonomi regional seperti Semarang, Yogyakarta, dan Magelang memberikan potensi besar bagi pengembangan sektor perdagangan, pariwisata, dan pertanian modern.



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Sumber: simtaru-dpupr.temanggungkab.go.id

B. Demografis Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung memiliki jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung, jumlah penduduk pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 814.879 jiwa, dengan rincian 409.118 laki-laki dan 405.761 perempuan. Angka ini menunjukkan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kabupaten ini. Struktur usia penduduk Kabupaten Temanggung menunjukkan distribusi yang cukup merata. Data dari BPS Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa proporsi penduduk pada kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi, yang mencerminkan potensi tenaga kerja yang besar. Sebaliknya, kelompok usia non-produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) memiliki proporsi yang lebih kecil, meskipun tetap signifikan. Distribusi usia ini penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Temanggung menunjukkan keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Data dari BPS Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin berada pada angka yang mendekati 1:1, yang berarti tidak ada dominasi signifikan antara salah satu jenis kelamin. Keseimbangan ini penting dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Dengan luas wilayah sekitar 870,65 km² dan jumlah penduduk lebih dari 800.000 jiwa, Kabupaten Temanggung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang bervariasi antar kecamatan. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi biasanya terletak di sekitar ibu kota kabupaten dan pusat-pusat ekonomi, sementara kecamatan di daerah pegunungan cenderung memiliki kepadatan yang lebih rendah. Variasi kepadatan ini mempengaruhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik di masing-masing wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 71,86, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 71,33. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Indikator utama IPM 2024 adalah:

- Umur Harapan Hidup: 75,94 tahun
- Rata-rata Lama Sekolah: 7,53 tahun
- Harapan Lama Sekolah: 12,62 tahun
- Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun: Rp10.519.000

Capaian ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas hidup di Temanggung.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Temanggung	84.294 jiwa	11	Kaloran	27.194 jiwa
2	Parakan	54.158 jiwa	12	Kandangan	34.893 jiwa
3	Bulu	49.751 jiwa	13	Kedu	38.476 jiwa
4	Kledung	28.463 jiwa	14	Ngadirejo	37.112 jiwa
5	Bansari	24.498 jiwa	15	Jumo	28.131 jiwa
6	Tlogomulyo	27.382 jiwa	16	Gemawang	22.134 jiwa
7	Tembarak	33.456 jiwa	17	Candiroto	22.872 jiwa
8	Selopampang	16.785 jiwa	18	Bejen	22.456 jiwa
9	Kranggan	28.762 jiwa	19	Tretep	21.345 jiwa
10	Pringsurat	33.267 jiwa	20	Wonoboyo	23.543 jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

Selanjutnya yaitu Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih didominasi oleh kelompok dengan tingkat pendidikan rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), jumlah penduduk Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, mencapai 822.880 jiwa pada tahun 2024. Dari total jumlah tersebut, hanya 4,26% penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Rinciannya, sebanyak 0,4% merupakan lulusan Diploma I dan II

(D1 dan D2), 0,9% lulusan Diploma III (D3), 2,81% lulusan Sarjana (S1), 0,14% lulusan Magister (S2), dan hanya 0,007% yang mencapai jenjang Doktor (S3). Sementara itu, penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA) mencapai 11,99%. Lulusan pendidikan menengah pertama (SMP) berjumlah 14,92%, sedangkan tamatan sekolah dasar (SD) tercatat sebanyak 21,25%. Di sisi lain, terdapat 16,91% penduduk yang belum menamatkan pendidikan dasar (belum tamat SD), dan sebanyak 30,68% penduduk tercatat tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal. Berikut ini adalah rincian jumlah penduduk Kabupaten Temanggung menurut jenjang pendidikan per Desember 2024:

Tabel 2. Persentase Penduduk Temanggung Menurut Jenjang Pendidikan (Desember 2024)

NO	PENDIDIKAN	JIWA	PERSENTASE
1.	SD	174.830	21,25%
2.	SMP	122.750	14,92%
3.	SMA	98.660	11,99%
4.	DIPLOMA I dan II	3.317	0,4%
5.	DIPLOMA III	7.378	0,9%
6.	PENDIDIKAN S-1	23.160	2,81%
7.	PENDIDIKAN S-2	1.117	0,14%
8.	PENDIDIKAN S-3	60	0,007%
9.	BELUM TAMAT SD	139.160	16,91%
10.	TIDAK SEKOLAH	252.440	30,68%

Sumber : Databoks

Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Temanggung didominasi oleh penduduk yang memeluk agama Islam. Namun, terdapat pula keberagaman agama di setiap kecamatan, meskipun jumlahnya bervariasi. Keberagaman ini mencerminkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang terjaga dengan baik di Kabupaten Temanggung.

Tabel / *Table* : 3.13.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, 2022
Number of Population Based on Religion sorted by District of Temanggung Regency, 2022

Kecamatan / *District*	Islam / *Moslem*	Kristen / *Christian*	Katholik / *Catholic*	Hindu	Budha / *Buddhist*	Konghucu	Kepercayaan / *Belief*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Parakan	51 066	2 069	520	0	206	5	0
2. Kledung	27 785	432	41	1	3	1	1
3. Bansari	23 853	470	18	0	55	0	0
4. B u l u	49 091	268	101	0	61	0	0
5. Temanggung	76 664	4 216	2291	7	145	1	2
6. Tlogomulyo	23 085	36	34	0	44	0	19
7. Tembarak	31 506	19	3	0	0	0	0
8. Selopampang	20 591	7	0	0	0	2	36
9. Kranggan	48 572	1 117	186	7	8	1	1
10. Pringsurat	51 496	663	226	0	383	0	17
11. Kaloran	38 723	1 965	287	7	5 251	0	167
12. Kandangan	51 556	942	680	4	4	1	0
13. K e d u	58 965	263	178	0	7	2	64
14. Ngadirejo	56 177	768	419	8	23	1	5
15. J u m o	28 715	630	46	0	888	0	16
16. Gemawang	33 163	696	40	0	46	0	20
17. Candiroto	32 690	345	138	0	83	0	0
18. Bejen	20 439	204	731	18	198	0	2
19. Tretep	21 398	12	1	2	0	0	0
20. Wonoboyo	26 404	66	333	0	44	0	0
Jumlah 2022	**771 939**	**15 188**	**6 273**	**54**	**7 449**	**14**	**350**
2021	770 920	15 277	6 358	52	7 448	15	359
2020	765 890	15 340	6 415	50	7 477	16	368

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
Source : Departement of population and Civil Registration of Temanggung Regency

C. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah sekitar 870,65 km² dan dihuni oleh sekitar 814.879 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Secara umum, struktur sosial masyarakat di wilayah ini masih didominasi oleh komunitas pedesaan dengan ikatan sosial yang kuat. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, terutama sebagai petani tembakau, kopi, dan hortikultura, yang menjadi ciri khas aktivitas ekonomi utama di daerah pegunungan ini. Perubahan sosial mulai terlihat seiring berkembangnya sektor industri kecil, jasa, dan desa wisata. Masyarakat mulai mengadopsi pola kerja yang lebih beragam, termasuk dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis potensi lokal.

Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial yang bergerak dari sistem ekonomi agraris tradisional menuju struktur ekonomi yang lebih modern dan terintegrasi. Dalam aspek kesejahteraan, Kabupaten Temanggung menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Tingkat kemiskinan menurun dari 10,17% pada tahun 2020 menjadi 9,33% pada tahun 2022. Meskipun demikian, tantangan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan kesenjangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Ekonomi Kabupaten Temanggung ditopang oleh sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi masyarakat. Komoditas unggulan seperti tembakau, kopi, vanili, dan hortikultura tidak hanya menopang kebutuhan ekonomi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi pada perekonomian regional dan nasional.

Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi arabika dan robusta terbesar di Jawa Tengah, dengan kualitas yang telah dikenal luas hingga pasar ekspor. Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi di bidang pertanian semakin dikembangkan, salah satunya melalui program “Kenangan Bansari”. Program ini mengintegrasikan sektor hortikultura dengan pariwisata edukatif, sehingga tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menambah pendapatan masyarakat lokal. Transformasi ini menunjukkan adanya upaya diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

Kabupaten Temanggung juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan kearifan lokal dan budaya tradisional. Kekayaan ini tercermin dalam keberadaan lebih dari 2.500 kelompok kesenian, termasuk sekitar 800 kelompok seni kuda kepang (jaranan) yang tersebar di berbagai desa. Kesenian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pelestarian nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat.

Selain kekayaan seni pertunjukan, Temanggung juga menyimpan lebih dari 100 situs sejarah yang berasal dari zaman Mataram Kuno hingga masa penyebaran agama Islam. Situs-situs ini menjadi daya tarik wisata sejarah dan spiritual, sekaligus menegaskan peran penting Kabupaten Temanggung dalam lintasan sejarah budaya di Jawa Tengah.

Tradisi pertanian masyarakat Temanggung juga mengandung nilai budaya yang tinggi. Pola bercocok tanam di lereng pegunungan dengan sistem terasering tidak hanya efisien secara ekologis, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam masih terjaga dalam praktik pertanian tradisional tersebut.

D. Sejarah Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan nilai-nilai historis, budaya, dan spiritual. Sejak masa kuno hingga masa kemerdekaan, wilayah ini telah memainkan peran penting dalam dinamika sejarah Pulau Jawa, khususnya dalam konteks pemerintahan, perdagangan, serta perkembangan agama dan budaya.

1. Masa Kerajaan Mataram Kuno

Sejarah Kabupaten Temanggung dapat ditelusuri sejak masa Kerajaan Mataram Kuno, sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan arkeologis berupa Candi Pringapus di Kecamatan Ngadirejo, sebuah candi bercorak Hindu yang diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Wangsa Sanjaya. Keberadaan candi ini menunjukkan bahwa wilayah Temanggung pada masa itu telah menjadi bagian dari pusat kegiatan keagamaan dan pemerintahan.

Selain Candi Pringapus, sejumlah artefak seperti arca, prasasti, dan struktur bangunan kuno juga ditemukan di berbagai titik wilayah Temanggung, mengindikasikan bahwa kawasan ini telah memiliki peradaban yang maju sejak era pra-Islam. Temanggung kemungkinan besar merupakan bagian dari jalur penting antara dataran tinggi Dieng dan wilayah Mataram Kuno di Jawa Tengah bagian selatan.

2. Masa Islamisasi dan Mataram Islam

Memasuki abad ke-15 hingga ke-17, pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Temanggung seiring dengan berkembangnya Kerajaan Mataram Islam. Sejumlah tokoh ulama dan wali diketahui menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Salah satu situs penting yang menjadi bukti persebaran Islam adalah kompleks makam para tokoh penyebar agama di wilayah Kaloran dan sekitarnya.

Pada masa ini, sistem sosial masyarakat mulai berubah. Pola-pola hidup agraris yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha bertransformasi mengikuti nilai-nilai Islam, yang memengaruhi tradisi, kesenian, hingga pranata sosial masyarakat. Banyak tradisi lokal yang saat ini masih hidup merupakan hasil akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dan Islam, seperti tradisi sedekah bumi, nyadran, dan suronan.

3. Masa Kolonial Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, Temanggung menjadi wilayah strategis dalam sistem ekonomi kolonial, terutama melalui kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel). Komoditas tembakau Temanggung menjadi salah satu hasil bumi utama yang diekspor oleh pemerintah kolonial ke Eropa. Bahkan hingga kini, tembakau Temanggung dikenal luas sebagai salah satu tembakau terbaik di Indonesia karena aroma dan kualitasnya yang khas. Keberadaan tembakau tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga membentuk struktur sosial dan budaya lokal. Petani tembakau memiliki posisi penting dalam masyarakat, dan berbagai ritus budaya pertanian tembakau

berkembang seiring waktu. Namun, sistem tanam paksa juga meninggalkan jejak penderitaan sosial dan ketimpangan ekonomi yang cukup mendalam di masa itu.

4. Masa Kemerdekaan dan Pembentukan Kabupaten

Setelah Indonesia merdeka, wilayah Temanggung secara resmi ditetapkan sebagai daerah administratif dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah otonom. Sejak saat itu, Kabupaten Temanggung memiliki status sebagai kabupaten dengan pemerintahan sendiri, dipimpin oleh bupati sebagai kepala daerah. Sejak masa kemerdekaan, Kabupaten Temanggung terus mengalami pembangunan di berbagai bidang, meskipun tetap mempertahankan kekayaan nilai sejarah dan tradisi lokal. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, termasuk perlindungan terhadap situs-situs sejarah serta pengembangan seni tradisional yang telah menjadi identitas daerah.

5. Sejarah dalam Kehidupan Modern

Dalam perkembangan mutakhir, sejarah panjang Kabupaten Temanggung menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah. Warisan budaya masa lalu tidak hanya menjadi simbol identitas lokal, tetapi juga daya tarik pariwisata yang mendukung perekonomian masyarakat. Program pengembangan desa wisata berbasis sejarah dan budaya kini mulai dikembangkan di berbagai kecamatan.

Masyarakat Temanggung tetap mempertahankan nilai-nilai gotong royong, religiusitas, dan kesederhanaan, yang tumbuh dari akar sejarah panjangnya. Tradisi seperti seni kuda kepang, tari tradisional, hingga ritual agraris menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kuatnya ikatan antara masa lalu dan masa kini.

Berikut adalah profil resmi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung periode 2025–2030, Agus Setyawan, S.E. dan drg. Nadia Muna, yang dapat digunakan dalam skripsi atau laporan ilmiah Anda:

E. Profil Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Periode 2025–2030

1. Agus Setyawan, S.E. (Bupati Temanggung)

- Nama Lengkap: Agus Setyawan, S.E.
- Tempat, Tanggal Lahir: Campurejo, 16 Agustus 1975
- Agama: Islam
- Alamat: Desa Campurejo, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung
- Status Perkawinan: Kawin
- Nama Istri: Panca Dewi, S.E.
- Pendidikan Terakhir: Sarjana Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (2000)
- Riwayat Pekerjaan:
    1. Kepala Desa Campurejo (2007–2024)
    2. Bupati Temanggung (2025–2030)
- Riwayat Organisasi:
    1. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Temanggung
    2. Anggota Forum Kepala Desa Jawa Tengah

Prestasi Selama Menjadi Kepala Desa Campurejo:

- Mendirikan Desa Cyber Campurejo, menjadikannya sebagai desa digital pertama di Jawa Tengah.
- Membangun 5 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), 3 Taman Kanak-Kanak (TK), 27 mushalla, 6 masjid, kantor desa, puskesmas pembantu, dan gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .

2. drg. Nadia Muna (Wakil Bupati Temanggung)

- Nama Lengkap: drg. Nadia Muna
- Tempat, Tanggal Lahir: Temanggung, 10 Mei 1992
- Agama: Islam
- Alamat: Desa Gubugsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung
- Status Perkawinan: Belum Kawin
- Pendidikan Terakhir: Dokter Gigi, Universitas Gadjah Mada (2015)
- Riwayat Pekerjaan:
    1. Dokter Gigi di Puskesmas Temanggung
    2. Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (2024–2029)
    3. Wakil Bupati Temanggung (2025–2030)

- Riwayat Organisasi:
    1. Ketua Ikatan Dokter Gigi Indonesia (IDGI) Cabang Temanggung
    2. Anggota Forum Dokter Gigi Muda Indonesia

Komitmen dalam Bidang Kesehatan:

- Fokus pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat, terutama dalam pencegahan penyakit gigi dan mulut.
- Berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah pedesaan.

F. Dinamika Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Temanggung tahun 2024 merupakan bagian dari agenda demokrasi lokal yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Pelaksanaan Pilkada ini menampilkan dinamika politik yang cukup menarik, baik dari sisi koalisi partai politik, latar belakang kandidat, partisipasi masyarakat, hingga tanggapan publik terhadap visi dan misi yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Pada Pilkada 2024 ini, terdapat tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang secara resmi bertarung dalam kontestasi politik daerah. Pasangan calon nomor urut 1, yaitu Agus Setyawan, S.E. dan drg. Nadia Muna, memperoleh dukungan dari koalisi yang terdiri atas PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hanura. Agus Setyawan merupakan mantan kepala desa Campurejo yang dikenal luas atas keberhasilannya mengembangkan desa digital dan sektor pertanian terpadu. Sementara itu, drg. Nadia Muna adalah seorang profesional di bidang kesehatan gigi, kader PPP, dan juga anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2024.

Pasangan calon nomor urut 2, Dr. R. Heri Ibnu Bowo, S.H., M.Si. berpasangan dengan Fuad Hidayat, S.E., dan diusung oleh Partai Demokrat serta Partai Bulan Bintang (PBB). Sementara itu, pasangan nomor urut 3, yaitu H.M. Al Khadziq, yang merupakan bupati petahana, kembali mencalonkan diri dengan menggandeng Bimo Alugoro, dengan dukungan dari Partai Gerindra dan NasDem. Kompetisi antara ketiga pasangan calon ini memperlihatkan konfigurasi koalisi politik yang tidak konvensional. Hal tersebut tercermin dari tidak menyatunya partai-partai besar dalam satu blok koalisi tunggal, melainkan menyebar mendukung pasangan yang berbeda sesuai dengan kalkulasi strategis masing-masing partai.

Salah satu momen penting dalam rangkaian tahapan Pilkada Temanggung 2024 adalah kegiatan kirab kampanye damai yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024. Ketiga pasangan calon berpartisipasi dalam kirab yang dimulai dari Pendopo Pengayoman dan melintasi sejumlah wilayah strategis, seperti Kecamatan Temanggung, Bulu, Parakan, dan Kedu. Kirab ini bertujuan untuk memperkenalkan para kandidat secara langsung kepada masyarakat serta menyosialisasikan visi dan misi yang diusung. Partisipasi masyarakat dalam rangkaian kampanye terbilang tinggi. Selain menghadiri kampanye terbuka, masyarakat juga menunjukkan keterlibatan aktif melalui diskusi publik dan kegiatan tatap muka yang diselenggarakan oleh para calon. Para pasangan calon pun memanfaatkan berbagai platform, baik media sosial maupun forum komunitas, sebagai bagian dari strategi komunikasi politik yang efektif dan menyentuh langsung masyarakat.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung, jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada Pilkada 2024 mencapai 619.518 orang. Namun demikian, tingkat partisipasi pemilih mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, yakni sebesar 84,80%, menurun dari 85% pada tahun 2018. Penurunan ini diperkirakan disebabkan oleh kejenuhan politik akibat padatnya jadwal pemilu dan pilkada yang berlangsung dalam waktu berdekatan. Meski terjadi penurunan, angka partisipasi tersebut masih berada pada tingkat yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain, yang menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi masyarakat Kabupaten Temanggung tetap kuat dan stabil.

Hasil penghitungan suara menunjukkan bahwa pasangan Agus Setyawan, S.E. dan drg. Nadia Muna berhasil meraih dukungan tertinggi dengan 46,71% suara. Mereka unggul atas pasangan Dr. Heri-Fuad yang memperoleh 40,72% suara, serta pasangan Al Khadziq-Bimo dengan 12,57% suara. Atas hasil tersebut, KPU Kabupaten Temanggung secara resmi menetapkan pasangan Agus-Nadia sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Temanggung untuk periode 2025–2030. Kemenangan pasangan Agus-Nadia dipandang sebagai refleksi dari keinginan masyarakat untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di tingkat daerah. Agus, dengan latar belakang sebagai pemimpin desa, dianggap representatif dari kalangan akar rumput yang memahami secara langsung persoalan dan kebutuhan warga. Sementara itu, keterlibatan drg. Nadia Muna yang berasal dari kalangan profesional muda menjadi simbol pembaruan dalam struktur kepemimpinan, sekaligus mencerminkan harapan akan hadirnya tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan progresif.

Dukungan masyarakat terhadap pasangan ini juga menunjukkan adanya harapan besar dalam pembangunan di bidang kesehatan, pertanian, pemberdayaan perempuan, dan digitalisasi desa, sebagai prioritas utama dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, hasil Pilkada Temanggung 2024 tidak hanya menjadi penentu siapa yang memimpin daerah, tetapi juga cerminan dinamika sosial-politik dan aspirasi warga terhadap masa depan pembangunan Kabupaten Temanggung.

BAB IV

POSISI DAN TUJUAN PARTAI POLITIK

Pada bab ini akan dibahas mengenai peran partai politik dalam struktur tim sukses, serta alasan pasangan Agus-Nadia memilih partai politik sebagai elemen inti tim, dibandingkan dengan relawan. Pembahasan ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, serta didukung oleh dokumen-dokumen yang relevan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang sesuai dengan topik, sehingga menghasilkan karya tulis yang terstruktur secara sistematis dan komprehensif.

A. Posisi Partai Politik dalam Struktur Tim Sukses

Dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada), Partai politik memainkan peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai pengusung resmi pasangan calon, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pemenangan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Miriam Budiardjo yang menyatakan bahwa partai politik merupakan kelompok yang terorganisasi, dengan anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna melaksanakan kebijakan umum. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara dan menyampaikan aspirasi mereka. Dalam konteks pilkada, keberadaan partai politik menjadi mutlak karena persyaratan pencalonan mewajibkan dukungan dari partai atau gabungan partai politik. Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Ketua DPC PDIP dalam wawancara yang menyatakan:

> *"Disini partai itu sebagai kendaraan utama mba, jadi secara struktural mereka yang resmi mengusung calon, jadi otomatis mereka ini mempunyai posisi yang kuat dalam tim sukses tanpa partai calon ga bisa maju, terutama di level pilkada ini." (Wawancara, Ketua DPC PDIP, 24 Mei 2025)*

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa partai politik memiliki posisi yang sangat menentukan dalam proses pencalonan. Pasangan Agus-Nadia pun tidak dapat dipisahkan dari struktur formal ini karena mereka diusung secara resmi oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Dukungan partai menjadi fondasi utama yang memberikan legitimasi administratif dan politik terhadap pencalonan mereka. Namun, peran partai politik tidak hanya berhenti pada level formal sebagai pengusung. Dalam struktur tim sukses, partai memegang peranan yang lebih luas, yaitu sebagai penyedia sumber daya logistik dan manusia, sekaligus sebagai pengelola strategi kampanye yang sistematis. Ketua DPC PDIP menjelaskan bahwa partai memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan operasional kampanye, termasuk alat peraga, dan pengorganisasian kegiatan di lapangan. Ia menyatakan:

> *"Legitimasi yang diberikan oleh partai politik sangat penting. Ketika calon didukung oleh partai besar, masyarakat cenderung lebih percaya dan yakin terhadap kapasitas calon tersebut. Selain itu, partai juga membantu dalam pengorganisasian kampanye, mulai dari logistik, hingga koordinasi kader di lapangan. Ini membuat jalannya kampanye lebih terstruktur dan terarah." (Wawancara, Ketua DPC PDIP, 24 Mei 2025)*

Kekuatan partai terletak pada jaringannya yang tersebar dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk di tingkat RT dan RW. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi pasangan Agus-Nadia karena memungkinkan kampanye dijalankan dengan jangkauan yang luas dan daya mobilisasi yang kuat. Peran kader partai di lapangan menjadi sangat signifikan dalam menyampaikan pesan-pesan kampanye dan membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Tim Sukses pasangan Agus-Nadia:

> *"Saya melihat partai politik memang sangat penting dalam struktur tim sukses. Mereka bukan hanya sebagai pengusung resmi, tetapi juga sebagai penghubung antara calon dengan masyarakat luas. Kader-kader partai yang*

tersebar di berbagai daerah bertugas menggerakkan dukungan, menyampaikan visi misi calon, dan memastikan strategi kampanye berjalan sesuai rencana. Tanpa peran aktif partai, sulit bagi calon untuk menjangkau pemilih secara efektif." (Wawancara, Sekretaris Tim Sukses, 31 Mei 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran partai dalam struktur tim sukses bukan hanya formalitas, tetapi substansial. Kader-kader partai memiliki peran strategis dalam menggerakkan mesin kampanye dan menjaga kesinambungan komunikasi antara calon dan pemilih. Mereka bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga bagian dari perencana dan pengarah strategi di lapangan. Selain fungsi logistik dan penghubung masyarakat. Partai politik juga berperan dalam konsolidasi dukungan politik dan pengamanan suara di TPS. Mereka memiliki sistem yang lebih mapan dalam menjaga suara pasangan calon, termasuk mengorganisir saksi dan melakukan pelatihan untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu. Artinya, keberadaan partai dalam tim sukses tidak hanya relevan dalam masa kampanye, tetapi juga dalam proses penghitungan suara.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan elemen inti dalam struktur tim sukses pasangan Agus-Nadia. Tanpa dukungan dari partai, baik dalam bentuk legalitas pencalonan, mobilisasi kader, logistik, strategi kampanye, maupun legitimasi publik, maka efektivitas kampanye akan sangat berkurang. Oleh karena itu, keputusan pasangan Agus-Nadia untuk menempatkan partai politik sebagai pusat dari tim sukses mereka bukan hanya didasarkan pada syarat administratif, tetapi sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan kekuatan organisasi politik yang telah terstruktur dan berpengalaman. Dengan demikian, keberhasilan pasangan calon dalam pilkada tidak dapat dipisahkan dari peran aktif partai politik sebagai tulang punggung struktur pemenangan. Peran ini mencakup seluruh aspek mulai dari pencalonan, strategi, pelaksanaan kampanye, pengamanan suara, hingga membangun legitimasi politik di mata publik. Dalam konteks ini, partai

politik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi utama dalam memenangkan kontestasi politik lokal.

B. Tujuan Partai Politik

Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, keberadaan partai politik dalam struktur tim sukses bukan sekadar pemenuhan aspek legal-formal pencalonan, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi pemenangan yang bersifat sistematis dan terorganisasi. Fungsi ini tampak nyata dalam keputusan pasangan Agus-Nadia yang menempatkan partai sebagai inti dari tim sukses mereka. Salah satu alasan utama mengapa partai politik dipilih sebagai elemen inti adalah karena partai memiliki infrastruktur politik yang lengkap dan menjangkau hingga ke tingkat akar rumput. Seorang narasumber dari internal tim sukses menyampaikan:

> *"Kenapa partai biasanya dipilih sebagai inti tim sukses? Karena mereka punya jaringan yang lengkap dari atas sampai bawah—dari DPP sampai ranting desa. Itu penting banget buat mobilisasi dan pengamanan suara." (Wawancara, Sekretaris Tim Sukses Agus-Nadia, 31 Mei 2025).*

Pernyataan ini mencerminkan bahwa keberadaan struktur vertikal partai politik, mulai dari pusat hingga daerah, berperan penting dalam proses mobilisasi dan distribusi strategi kampanye. Hal ini dapat dipahami melalui konsep political machine sebagaimana dijelaskan oleh Edward Aspinall (2013). Dalam penelitiannya mengenai politik Indonesia, Aspinall menyebut bahwa mesin politik bekerja berdasarkan relasi patronase yang menghubungkan elite partai dengan aktor-aktor lokal melalui jaringan tim sukses, simpatisan, dan elemen birokrasi. Dalam sistem ini, dukungan politik tidak hanya dimobilisasi melalui ideologi atau program, tetapi juga melalui insentif material, loyalitas personal, dan penguasaan terhadap struktur lokal. Dengan kata lain, partai politik tidak sekadar menjalankan fungsi elektoral formal, melainkan juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran dukungan berbasis sumber daya dan kekuasaan. Dalam konteks tim sukses pasangan Agus-Nadia, peran ini termanifestasi

dalam upaya partai untuk menjangkau pemilih secara langsung melalui kekuatan kader dan struktur organisasi yang dimiliki. Keunggulan partai politik dalam hal sumber daya manusia juga menjadi alasan lain mengapa mereka dijadikan tulang punggung utama tim sukses. Hal ini disampaikan oleh salah satu pengurus partai pengusung yang terlibat aktif dalam kampanye:

> *"Kader partai juga rata-rata sudah punya pengalaman kampanye. Mereka ngerti strategi, ngerti peta politik, bahkan punya akses langsung ke sumber daya. Jadi kerjanya lebih tertata dan bisa dikontrol."(Wawancara, Anggota DPC PKS, 22 Mei 2025).*

Hal tersebut menegaskan bahwa kader partai memiliki kapasitas teknis dan pengalaman politik yang memungkinkan pelaksanaan kampanye berjalan secara efektif. Dalam perspektif teori mobilisasi politik, pendekatan partai ini dapat dikategorikan sebagai mobilisasi instrumental, yakni mobilisasi yang dilakukan secara top-down, stabil, dan terstruktur. Berbeda dengan pendekatan relawan yang bersifat ekspresif dan spontan, pendekatan partai lebih dapat dikendalikan karena memiliki mekanisme komando yang jelas. Hal ini turut diamini oleh salah satu anggota tim kampanye yang menyatakan:

> *"Kalau relawan itu memang penting, tapi mereka lebih cair. Kadang sulit dikendalikan kalau nggak ada struktur yang jelas. Makanya, partai tetap dijadikan tulang punggung utama dalam tim."(Wawancara, Anggota Divisi Lapangan Tim Sukses, 10 Juni 2025).*

Dalam hal ini menggambarkan tantangan dalam mengandalkan relawan sebagai kekuatan utama dalam kampanye. Meskipun relawan memiliki nilai dalam hal dukungan emosional dan simbolik, efektivitas kerja lapangan lebih terjamin ketika dikelola oleh struktur partai yang telah memiliki pengalaman dan sistem kerja yang teruji. Selain mobilisasi dan pengorganisasian, partai politik juga memainkan peran strategis dalam membangun koalisi dan mediasi kepentingan politik. Partai memiliki

akses dan pengaruh dalam menjembatani komunikasi antar elit, menyusun strategi lintas partai, hingga melakukan lobi politik di tingkat regional maupun nasional. Hal ini dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

> *"Partai juga punya kekuatan buat bangun koalisi politik. Mereka bisa jembatani kepentingan elit, komunikasi antar partai, sampai urusan lobi di tingkat nasional."(Wawancara, Ketua DPC PDIP, 24 Mei 2025).*

Dari pernyataan ini terlihat bahwa partai politik tidak hanya bertindak sebagai aktor kampanye, tetapi juga sebagai mediator politik yang memiliki kemampuan untuk mengelola kepentingan banyak pihak. Fungsi ini menjadi penting, terutama dalam situasi politik lokal yang kompleks dan penuh dengan dinamika kekuasaan. Dalam hal ini, partai menjadi agen politik utama dalam menciptakan kestabilan koalisi, memperluas basis dukungan, serta menjaga kontinuitas kekuasaan pasca pemilihan.

Secara keseluruhan, keberadaan partai politik dalam tim sukses pasangan Agus-Nadia tidak hanya sebatas memenuhi syarat pencalonan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjalankan kampanye yang efektif, terorganisir, dan terarah. Dengan struktur yang mapan, pengalaman politik, serta akses terhadap sumber daya dan jaringan luas, partai politik berperan sebagai pilar utama dalam strategi pemenangan. Sementara relawan tetap dilibatkan sebagai kekuatan pendukung tetapi partai tetap menjadi fondasi utama karena kapasitasnya yang menyeluruh dalam mengelola dinamika politik secara sistematis.

BAB V

REKRUTMEN DAN POLITIK IMBALAN DALAM TIM PEMENANGAN AGUS-NADIA

A. Pola Rekrutmen Timses dan Orang-Orang Partai Politik

Dalam proses pembentukan tim pemenangan pasangan Agus–Nadia, rekrutmen yang dilakukan lebih bersifat informal dan tanpa melalui mekanisme seleksi berbasis merit. Sebagian besar anggota tim direkrut berdasarkan kedekatan personal dan loyalitas politik, bukan karena kompetensi atau pengalaman yang relevan dalam kampanye. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan seorang mantan anggota tim sukses yang mengungkapkan:

> *"Saya memang sudah lama dekat dengan Pak Agus, sejak beliau masih di menjadi kepala desa. Jadi ketika beliau maju Pilkada, saya langsung diajak ikut bantu sebagai koordinator wilayah."(Wawancara, Mantan Tim Sukses, 2025).*

Pernyataan ini menegaskan bahwa hubungan personal menjadi faktor utama dalam pemilihan anggota tim, bahkan untuk posisi strategis seperti koordinator wilayah. Ini juga menunjukkan bahwa dalam kasus ini, proses perekrutan tidak dilakukan berdasarkan sistem seleksi formal atau kriteria objektif, melainkan lebih kepada hubungan emosional dan kedekatan dengan kandidat. Lebih lanjut, narasumber yang sama memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang proses rekrutmen yang ada:

> *“Sejujurnya nggak ada proses seleksi formal. Kebanyakan dari kami direkrut karena sudah dikenal secara personal atau dianggap loyal.”(Wawancara, Mantan Tim Sukses, 2025).*

Pernyataan ini mempertegas bahwa dalam struktur tim sukses pasangan Agus-Nadia, loyalitas pribadi dan hubungan personal menjadi syarat utama dalam

menentukan siapa yang akan bergabung dengan tim pemenangan. Tidak ada proses seleksi terbuka atau transparansi mengenai kualifikasi yang diperlukan, yang merupakan ciri khas dari sistem patronase politik. Penekanan pada relasi personal dalam rekrutmen ini juga didukung oleh pernyataan seorang pengurus partai politik tingkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan tim sukses:

> *"Biasanya kami mengajukan nama-nama dari pengurus atau simpatisan yang aktif. Nama-nama itu disetujui oleh calon atau orang dekatnya."(Wawancara, Pengurus Partai Politik, 2025).*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen di tingkat partai pun lebih didasarkan pada pengenalan pribadi dan hubungan langsung dengan kandidat atau elite partai. Nama-nama yang diusulkan sering kali merupakan individu yang sudah memiliki kedekatan dengan calon atau orang-orang yang dianggap loyal. Hal ini semakin menegaskan bahwa jaringan informal memainkan peran besar dalam pengisian posisi dalam tim sukses, bukan kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh calon anggota tim. Ketika ditanya mengenai apakah pengalaman kampanye menjadi salah satu pertimbangan dalam rekrutmen anggota tim, narasumber menjelaskan dengan tegas:

> *"Soal pengalaman kampanye itu bonus aja. Bahkan ada beberapa posisi strategis yang diisi oleh orang-orang yang minim pengalaman, tapi dekat secara emosional dengan kandidat."(Wawancara, Mantan Tim Sukses, 31 Mei 2025).*

Pernyataan ini sangat menggambarkan pola rekrutmen yang lebih menekankan pada faktor kedekatan emosional dan loyalitas politik, ketimbang pengalaman atau keahlian dalam bidang kampanye. Bahkan untuk posisi-posisi strategis yang memerlukan keterampilan teknis, seperti koordinator wilayah atau manajer kampanye, pengalaman dalam kampanye sering kali dianggap sebagai hal yang "bonus," bukan sebagai persyaratan utama. Fenomena ini mengarah pada pembentukan jaringan patronase politik yang lebih didorong oleh hubungan personal dan loyalitas politik

daripada profesionalisme atau kemampuan teknis. Hal ini sangat relevan dengan konsep yang diutarakan oleh Edward Aspinall dalam teori patronase, di mana posisi-posisi dalam struktur tim sukses sering kali diperoleh melalui transaksi politik berdasarkan loyalitas dan kedekatan pribadi, bukan karena prestasi atau kualifikasi teknis yang jelas.

Polarisasi antara loyalitas politik dan profesionalisme dalam perekrutan ini tentunya membawa implikasi yang signifikan terhadap efektivitas tim pemenangan selama kampanye. Ketika anggota tim lebih dipilih berdasarkan kedekatan personal dan loyalitas, alih-alih berdasarkan kompetensi, ada kemungkinan bahwa tugas-tugas penting dalam kampanye, seperti perencanaan strategis, mobilisasi massa, dan pengelolaan sumber daya, tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Tanpa pengalaman dan keterampilan teknis yang memadai, tim mungkin akan menghadapi kendala dalam mengelola dinamika kampanye yang kompleks. Di sisi lain, pembentukan tim berdasarkan patronase ini juga berpotensi menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada hubungan pribadi, yang dapat membatasi kemampuan tim untuk berfungsi secara objektif dan efisien. Dalam jangka panjang, ini juga dapat menciptakan kesenjangan antara kader partai yang loyal dan anggota tim yang tidak memiliki keahlian yang relevan dengan tugas yang diembannya. Hal ini bisa menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan strategi yang terukur.

Secara keseluruhan, pola rekrutmen yang bersifat personalistik dan lebih mengutamakan loyalitas politik daripada meritokrasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tim sukses dalam memenangkan pilkada tidak hanya bergantung pada profesionalisme dan keahlian, tetapi juga pada kemampuan tim untuk memanfaatkan relasi politik yang telah terjalin dalam jaringan partai dan simpatisan. Namun, dampaknya terhadap efektivitas kerja tim dan keberhasilan kampanye secara keseluruhan perlu menjadi perhatian, mengingat pentingnya profesionalisme dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan strategi kampanye yang efektif.

B. Politik Pasca Pemilu

Setelah proses kontestasi politik usai, praktik pembagian kekuasaan menjadi fenomena dalam dinamika politik lokal. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa loyalitas politik yang ditunjukkan selama masa kampanye sering kali dibalas dengan pemberian akses terhadap sumber daya negara. Praktik ini tidak hanya lumrah terjadi, tetapi telah menjadi bagian integral dalam budaya politik lokal sebagai bentuk imbal balik atau "balas jasa" atas keterlibatan dalam proses pemenangan kandidat. Salah satu bentuk konkret dari praktik ini adalah pemberian posisi strategis di pemerintahan, baik secara langsung dalam bentuk jabatan politik, penempatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), akses ke proyek-proyek pembangunan daerah, hingga penunjukan sebagai tenaga ahli di lingkungan pemerintahan. Seorang mantan anggota tim pemenangan mengungkapkan:

> *"Iya, beberapa teman saya yang aktif di lapangan sekarang dapat posisi di BUMD atau jadi tenaga ahli di kantor wali kota. Walaupun tidak semua dijanjikan secara langsung, tapi itu seperti 'balas jasa' yang sudah biasa terjadi.".(Wawancara, Mantan Tim Sukses, 31 Mei 2025).*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam kampanye tidak hanya dipandang sebagai bentuk dukungan politik semata, tetapi juga sebagai investasi politik yang diharapkan akan memberikan keuntungan material dan sosial pasca pemilu. Dalam hal ini, terdapat relasi patron-klien antara kandidat (patron) dan tim pemenangan (klien), di mana dukungan politik dibalas dengan distribusi sumber daya negara. Praktik semacam ini dipertegas oleh pernyataan dari salah satu pengurus partai:

> *"Kalau menang, tentu ada bagi-bagi posisi. Misalnya, jabatan staf ahli, rekomendasi proyek daerah, atau pengangkatan di lembaga tertentu."(Wawancara, Pengurus Partai PPP, 19 Mei 2025).*

Fenomena ini sejalan dengan teori patronase politik yang dikemukakan oleh Edward Aspinall, yang menjelaskan bahwa patronase adalah praktik distribusi sumber

daya oleh aktor politik kepada pendukungnya sebagai imbal balik atas dukungan politik. Dalam konteks demokrasi elektoral di Indonesia, Aspinall berpendapat bahwa patronase tidak melemah, melainkan justru berkembang melalui bentuk-bentuk baru yang menyesuaikan dengan logika demokrasi lokal. Ia menyebut bahwa dalam sistem ini, aktor politik menggunakan sumber daya negara—seperti jabatan publik atau proyek pembangunan—untuk membalas jasa tim sukses atau loyalis mereka, sebagai bagian dari strategi mobilisasi dukungan politik. Lebih lanjut, Aspinall menekankan bahwa hubungan patron-klien bersifat personal, informal, dan simbiotik, di mana kedua belah pihak saling memberikan keuntungan: patron memperoleh dukungan politik, sementara klien mendapatkan akses terhadap posisi atau sumber daya negara. Hal ini tercermin jelas dalam temuan lapangan yang menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap pembagian kekuasaan sudah menjadi pemahaman umum di antara para pelaku politik lokal, meskipun tidak selalu diucapkan secara terbuka. Seperti dikemukakan oleh seorang mantan timses:

> *"Enggak disampaikan secara terang-terangan. Tapi kita semua paham, kalau berhasil bantu menang, pasti akan 'diingat'. Itu semacam pemahaman tidak tertulis."(Wawancara, Mantan Tim Sukses, 31 Mei 2025).*

Dengan demikian, patronase dalam konteks ini bukan hanya praktik transaksional semata, tetapi sudah membentuk semacam norma sosial-politik yang terinternalisasi di kalangan aktor politik lokal. Ini sesuai dengan pandangan Aspinall bahwa patronase adalah bagian integral dari demokrasi klientelistis (clientelistic democracy), di mana praktik politik berlangsung melalui jaringan loyalitas personal dan pertukaran sumber daya, bukan melalui sistem meritokratis atau institusional. Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa patronase politik menjadi mekanisme utama dalam proses distribusi kekuasaan di tingkat lokal. Praktik ini membawa implikasi serius terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ketika jabatan publik didistribusikan berdasarkan loyalitas politik alih-alih kompetensi, maka potensi

terjadinya inefisiensi birokrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengabaian kepentingan publik menjadi semakin besar.

Praktik patronase yang terjadi setelah pemilu tidak hanya berfungsi sebagai strategi distribusi kekuasaan bagi aktor politik, tetapi telah mengakar sebagai bagian dari budaya politik yang terinstitusionalisasi secara informal. Dalam konteks ini, praktik "balas jasa politik" tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sah, selama tidak melanggar aturan hukum secara eksplisit. Hal ini tergambar jelas dalam pernyataan salah satu narasumber dari partai politik:

"Selama tidak melanggar hukum, saya rasa itu wajar. Namanya juga politik, pasti ada apresiasi terhadap mereka yang berjuang." (Wawancara, Anggota PDIP, 26 Mei 2025).

Pernyataan ini mencerminkan adanya pembenaran normatif terhadap praktik patronase, yang dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap loyalitas dan kontribusi selama proses pemenangan. Dalam pandangan pelaku politik lokal, pemberian jabatan atau akses terhadap proyek-proyek pemerintah merupakan "kompensasi yang pantas" bagi mereka yang dianggap telah berperan aktif dalam kampanye.

Dalam kerangka teori patronase politik ala Edward Aspinall, fenomena ini menunjukkan bahwa praktik distribusi kekuasaan pasca pemilu tidak semata-mata berbasis kebutuhan teknokratis atau meritokratis, tetapi lebih dilandaskan pada logika pertukaran politik personalistik. Aspinall menegaskan bahwa dalam demokrasi elektoral di Indonesia, praktik patronase telah mengalami institusionalisasi informal, di mana hubungan patron-klien dijalankan melalui norma sosial yang tidak tertulis, tetapi sangat dipahami oleh seluruh aktor yang terlibat.

Namun, walaupun praktik ini dianggap wajar oleh sebagian pelaku politik, dampak jangka panjangnya terhadap tata kelola pemerintahan tidak dapat diabaikan. Dalam

penelitian ini ditemukan bahwa pola distribusi jabatan berdasarkan loyalitas politik berisiko melahirkan sejumlah permasalahan serius, di antaranya:

- Masuknya aktor non-kompeten ke dalam struktur pemerintahan, yang dapat menghambat efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
- Pemburukan kualitas pelayanan publik, karena jabatan strategis tidak ditempati oleh individu yang memiliki kapasitas dan keahlian yang memadai.
- Meningkatnya potensi nepotisme dan konflik kepentingan, terutama ketika proses pengangkatan dilakukan tanpa mekanisme seleksi yang transparan.
- Tergesernya prinsip profesionalisme dan akuntabilitas, yang pada akhirnya melemahkan integritas institusi pemerintahan itu sendiri.

Dalam hal ini, praktik patronase pasca pemilu tidak hanya memberikan dampak terhadap struktur distribusi kekuasaan politik, tetapi juga membawa konsekuensi yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ketika norma-norma informal seperti "balas jasa politik" diterima sebagai sesuatu yang lumrah bahkan dianggap sah, maka praktik tersebut secara tidak langsung melegitimasi politik transaksional sebagai bagian dari mekanisme politik sehari-hari. Hal ini menciptakan kondisi di mana intervensi kepentingan politik mendominasi ruang-ruang pengambilan keputusan publik, termasuk dalam pengisian jabatan strategis dan alokasi sumber daya negara. Reproduksi patronase yang terus-menerus, terutama dalam suasana pasca kontestasi elektoral, menciptakan sistem yang tidak adil, tidak efisien, dan rawan penyimpangan. Birokrasi yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan publik dan pelaksana kebijakan yang netral justru berpotensi kehilangan independensi serta kualitas profesionalnya akibat tekanan dan dominasi kepentingan politik. Jika praktik ini dibiarkan, maka pembangunan sistem pemerintahan yang berbasis meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas akan menghadapi tantangan yang signifikan, bahkan dapat mengalami stagnasi atau kemunduran.

Lebih jauh, patronase yang dilembagakan secara informal memperlemah upaya pelembagaan demokrasi substansial. Dalam demokrasi yang sehat, jabatan publik seharusnya diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan orientasi pada pelayanan. Namun, ketika proses pengangkatan jabatan lebih didasarkan pada loyalitas politik daripada kapasitas teknokratis, maka demokrasi cenderung hanya berjalan di permukaan terbatas pada prosedur electoral tanpa disertai kualitas pemerintahan yang responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun praktik patronase dapat dipahami sebagai strategi adaptif dalam ekosistem politik lokal yang pragmatis, sangat penting untuk terus mendorong kesadaran kritis di kalangan elite politik, birokrat, dan masyarakat sipil. Kesadaran ini perlu dibarengi dengan reformasi institusional yang konkret, termasuk penataan sistem rekrutmen jabatan publik yang objektif, penguatan kapasitas pengawasan, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hanya dengan demikian, cita-cita membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik dapat diwujudkan secara berkelanjutan, ini bukan sekadar menolak patronase dalam bentuknya yang paling kasat mata, tetapi juga menantang cara berpikir politik yang menjadikan kekuasaan sebagai alat transaksi, bukan sebagai sarana pelayanan.

BAB VI

STRATEGI PEMENANGAN DAN PATRONASE POLITIK DI TINGKAT LOKAL

Pada bab ini mengulas tentang strategi patronase dan praktik klientelisme politik dalam proses pemenangan pasangan Agus–Nadia, dengan menyoroti bagaimana struktur partai di tingkat akar rumput, kemitraan dengan elite lokal, dan pembelian suara dimanfaatkan secara terorganisir sebagai bagian dari mesin politik yang bekerja intensif menjelang hari pemungutan suara.

A. Pemanfaatan Struktur Partai hingga Tingkat Ranting

Dalam proses pemenangan pilkada di tingkat lokal, salah satu strategi utama yang digunakan pasangan Agus-Nadia adalah mengaktifkan struktur partai politik hingga ke tingkat akar rumput, yakni pengurus ranting dan anak ranting. Struktur ini tidak hanya digunakan sebagai saluran komunikasi politik, tetapi berfungsi sebagai jaringan operasional utama dalam mobilisasi dukungan. Para pengurus ranting memainkan peran signifikan dalam menyosialisasikan kandidat, mendistribusikan bantuan, menyusun data pemilih, serta membangun komunikasi interpersonal dengan warga.

> *"Kami ini yang paling tahu siapa saja di lapangan. Kalau tidak lewat ranting, siapa yang bisa jangkau warga satu-satu? Dari data sampai kebutuhan warga, semuanya kami pegang. Jadi ketika kampanye, ya memang kami yang bekerja." (Wawancara, Pengurus Ranting Partai X, 2025)*

Peran aktif pengurus ranting memperlihatkan bahwa struktur partai tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga diaktifkan sebagai alat politik praktis yang bergerak secara terorganisir dalam setiap tahapan kampanye. Dalam banyak kasus, mereka bertindak layaknya agen lapangan yang memiliki pengetahuan lokal mendalam, serta mampu mengidentifikasi titik-titik strategis untuk mendulang suara. Bahkan, sebagian besar strategi pemenangan bersandar pada daya jangkau dan legitimasi sosial yang

dimiliki oleh pengurus tingkat bawah. Seorang anggota tim kampanye Adadia menambahkan:

> *"Kalau kita mau kampanye tanpa ranting, itu berat. Mereka yang tahu mana tokoh yang berpengaruh di RT, siapa yang harus didekati, bahkan siapa yang masih ragu milih. Mereka juga bantu data dan logistik. Jadi perannya penting mba. (Wawancara, Tim Kampanye Adadia, 31 Mei 2025).*

Fenomena ini selaras dengan konsep political machine, yaitu struktur organisasi politik yang bekerja secara sistematis dan hierarkis untuk menggalang dukungan melalui pertukaran imbalan (rewards) dan loyalitas. Menurut teori ini, seperti yang dijelaskan oleh Scott Mainwaring dan dikontekstualisasi oleh Edward Aspinall dalam studi-studi politik lokal Indonesia, mesin politik bertumpu pada distribusi sumber daya secara informal, seperti bantuan, janji proyek, atau dukungan pekerjaan, kepada konstituen yang bersedia memberikan suaranya. Dalam praktiknya, struktur partai di tingkat ranting sering kali menggantikan peran institusi negara, terutama dalam konteks pelayanan sosial dan respons terhadap kebutuhan warga. Mereka menjadi perantara yang lebih cepat dan responsif dibandingkan mekanisme birokrasi formal. Dengan demikian, kehadiran mereka tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mengisi kekosongan institusional yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang pengurus partai:

> *"Kalau warga butuh bantuan, mereka datangnya ke kita dulu, bukan ke kelurahan. Kita yang bantu urus, kita yang bantu jembatani. Jadi waktu pemilu, mereka juga merasa punya kewajiban bantu kita balik."(Wawancara, Pengurus Anak Ranting Partai PDIP, 31 Mei 2025).*

Relasi ini membentuk siklus pertukaran politik yang bersifat patron-klien, di mana kandidat (patron) menjanjikan atau memberikan manfaat politik dan ekonomi sebagai balas jasa kepada pemilih (klien) atas dukungan mereka. Dalam konteks ini, struktur partai lokal menjadi alat utama dalam mengorganisasi, mendistribusikan, dan

memantau jalannya pertukaran tersebut. Melalui peran struktur partai hingga ke tingkat ranting, terlihat jelas bahwa proses pemenangan tidak berjalan secara spontan, melainkan melalui kerja politik yang sistematis, terkoordinasi, dan sering kali berbasis pada jaringan informal yang kuat. Hal ini menunjukkan bagaimana demokrasi elektoral di tingkat lokal kerap dijalankan bukan melalui program dan ideologi, melainkan melalui kemampuan membangun jaringan dan mendistribusikan insentif politik.

Fungsi ganda yang dijalankan oleh struktur partai lokal sebagai aktor politik sekaligus sebagai agen sosial menjadikan mereka alat utama dalam menstabilkan praktik patronase. Mereka bekerja tidak hanya berdasarkan perintah formal partai, tetapi juga berdasarkan relasi sosial yang sudah terbangun lama dengan konstituen. Dalam hal ini, kepercayaan sosial menjadi modal politik, dan loyalitas warga tidak dibangun lewat narasi ideologis atau programatik, melainkan melalui pengalaman langsung menerima manfaat dari jaringan politik tersebut. Seorang pengurus ranting menyampaikan hal ini dengan gamblang:

> *"Warga itu sebenarnya enggak terlalu tanya program. Yang penting mereka merasa diperhatikan. Kita yang bantu waktu ada kebutuhan. Jadi waktu kita minta dukungan, mereka anggap itu biasa saja, semacam ganti kebaikan."(Wawancara, Pengurus Ranting Partai PDIP, 31 Mei 2025).*

Melalui peran struktur partai hingga ke tingkat ranting, terlihat bahwa proses pemenangan tidak berjalan secara spontan atau hanya mengandalkan popularitas kandidat. Sebaliknya, kemenangan diperoleh melalui kerja politik yang sistematis, terkoordinasi, dan sering kali bersandar pada jaringan informal yang kuat. Struktur partai di level akar rumput berperan sebagai penghubung yang menyelaraskan kepentingan politik elite dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, membangun relasi yang saling menguntungkan dalam jangka pendek. Dalam perspektif Edward Aspinall (2014), praktik ini merupakan bagian dari demokrasi klientelistis, yaitu bentuk demokrasi di mana hubungan personal dan transaksi material menggantikan

pertarungan ide dan program sebagai basis pertukaran antara elite dan pemilih. Demokrasi semacam ini berjalan bukan karena adanya deliberasi rasional antarkelompok warga, tetapi karena adanya jaringan patronase yang efisien dalam mendistribusikan sumber daya dan memastikan loyalitas politik.

Dengan kata lain, demokrasi elektoral di tingkat lokal kerap dijalankan bukan melalui perdebatan ideologis atau pemilihan berdasarkan visi-misi, melainkan melalui kemampuan membangun jaringan sosial-politik dan mendistribusikan insentif politik secara tepat sasaran. Struktur partai di tingkat bawah menjelma menjadi "mesin politik" yang tidak hanya bergerak menjelang pemilu, tetapi terus aktif dalam memelihara hubungan patronase di antara siklus elektoral. Implikasi dari temuan ini sangat penting. Ketika partai politik dan kandidat lebih menekankan pada loyalitas dan kedekatan personal ketimbang kompetensi dan gagasan, maka proses demokratisasi berisiko mengalami stagnasi. Institusi partai menjadi semakin bergantung pada kerja-kerja informal dan jaringan personal, sementara pemilih semakin terdorong untuk melihat politik sebagai ruang pertukaran kepentingan jangka pendek, bukan sebagai ruang advokasi aspirasi jangka panjang. Dengan demikian, struktur partai lokal bukan hanya alat mobilisasi suara, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen utama dalam menopang praktik patronase yang terorganisasi, menegaskan bahwa kontestasi politik di tingkat lokal masih sangat dipengaruhi oleh logika pertukaran material dan bukan oleh ide atau kebijakan.

B. Kerja Sama dengan Elite Lokal sebagai Penguat Jaringan

Selain mengandalkan struktur internal partai hingga ke tingkat ranting, pasangan Adadia ini juga secara aktif membangun aliansi strategis dengan elite lokal non-partai, seperti kepala desa, ketua RT/RW, tokoh agama, serta pengusaha lokal. Mereka berperan sebagai jembatan sosial dan politik antara kandidat dengan warga, terutama dalam mengamankan dukungan elektoral di komunitas yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh tim pemenangan. Keterlibatan elite ini bersifat strategis, karena mereka memiliki otoritas sosial dan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat,

serta dianggap lebih kredibel dibandingkan aktor luar. Seorang anggota tim sukses menjelaskan:

> *"Kami sengaja dekati kepala desa, RT, tokoh masjid, karena mereka punya pengaruh besar. Mereka bisa bantu jangkau warga yang kami susah akses. Kadang kami minta tolong mereka untuk kumpulin warga atau kasih rekomendasi. Tapi ya setelah menang, pasti ada hal yang kita pertimbangkan buat mereka."(Wawancara, Anggota Tim Sukses Adadia 31 Mei, 2025).*

Sementara itu, seorang pengurus partai tingkat kota juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi dengan elite informal lokal:

> *"Mesin partai memang penting, tapi kita juga enggak bisa kerja sendiri. Tokoh-tokoh lokal itu yang tahu medan. Kita libatkan mereka, kita ajak kerja sama, dan tentu setelah menang, ada perhatian balik. Kadang dalam bentuk proyek, kadang rekomendasi posisi, tergantung kontribusinya."(Wawancara, Pengurus Partai PKS, 22 Mei 2025).*

Keterangan-keterangan tersebut memperlihatkan bagaimana elite lokal seperti kepala desa dan ketua RT/RW berperan sebagai broker politik, yang menurut Edward Aspinall (2014), merupakan sosok perantara penting dalam sistem patronase demokrasi di Indonesia. Para broker ini memiliki kekuatan untuk mengarahkan suara komunitas dengan menukar dukungan politik masyarakat terhadap akses terhadap kekuasaan atau sumber daya negara setelah pemilu. Mereka tidak hanya mendukung secara pasif, tetapi aktif melakukan mobilisasi, penyampaian pesan, hingga pembentukan opini publik di tingkat akar rumput. Seorang kepala desa yang ditemui dalam penelitian juga menyatakan:

> *"Kita ini di lapangan yang langsung tahu kebutuhan masyarakat. Jadi kalau ada calon yang datang dan punya visi, kita bantu. Tapi ya tentu, kalau sudah*

duduk (menang), jangan lupakan desa. Kita ingin pembangunan itu benar-benar sampai."(Wawancara, Kepala Desa, 14 Mei 2025).

Pernyataan ini menggambarkan relasi timbal balikantara elite lokal dan kandidat: bukan semata karena loyalitas ideologis, melainkan karena harapan akan perhatian, akses, dan manfaat politik atau pembangunan yang dapat diterima setelah pemilu. Relasi ini tidak selalu bersifat formal, melainkan dijalankan atas dasar kesepahaman sosial yang bersifat informal dan tidak tertulis, namun tetap mengikat secara moral dan politis. Aspinall menyebut hubungan semacam ini sebagai bagian dari demokrasi klientelistis, di mana pemilu menjadi ajang pertukaran antara dukungan suara dengan distribusi sumber daya. Dalam praktiknya, broker lokal seperti kepala desa memiliki nilai strategis, karena mereka mengendalikan tidak hanya informasi lokal, tetapi juga jejaring sosial dan harapan warga. Mereka berperan sebagai pembuka jalan bagi kandidat, dengan imbalan ekspektasi bahwa komunitas mereka akan mendapatkan manfaat politik tertentu setelah kemenangan diraih.

Dengan demikian, keterlibatan elite lokal non-partai dalam kontestasi politik pada pilkada ini bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bagian inti dari mesin patronase elektoral yang bekerja secara informal dan terorganisasi. Mereka beroperasi di luar struktur resmi kampanye, namun memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengarahkan suara, menjaga stabilitas dukungan, dan memelihara relasi kekuasaan pasca pemilu. Dalam sistem politik lokal yang sangat bergantung pada jaringan sosial, peran broker seperti kepala desa menjadi tidak tergantikan, dan sekaligus memperkuat logika pertukaran dalam demokrasi elektoral Indonesia.

Fenomena keterlibatan elite lokal dalam proses pemenangan pilkada di tingkat daerah menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia tidak berjalan secara ideal dalam kerangka persaingan programatik yang sehat, melainkan banyak dipengaruhi oleh logika klientelisme dan patronase politik. Dalam hal ini, aktor-aktor lokal seperti kepala desa, ketua RT/RW, hingga tokoh agama dan pengusaha,

memainkan peran yang jauh melampaui fungsi sosial mereka, yaitu sebagai broker politik informal yang menjembatani kepentingan kandidat dengan suara masyarakat. Dari berbagai wawancara dan temuan lapangan, terlihat jelas bahwa dukungan politik elite lokal terhadap kandidat tidak didorong oleh ideologi atau kesesuaian visi-misi, melainkan oleh pertimbangan pragmatis: sejauh mana mereka dan komunitasnya akan memperoleh manfaat pasca kemenangan kandidat tersebut. Ini sejalan dengan pandangan Edward Aspinall mengenai karakter patronase demokrasi di Indonesia, yang ditopang oleh relasi-relasi informal antara patron (kandidat/aktor politik) dan klien (elite lokal dan masyarakat) yang saling bergantung satu sama lain dalam siklus pertukaran sumber daya dan dukungan politik (Fokatea & Mas'udi, 2020).

Pandangan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan elektoral tidak selalu ditentukan oleh kekuatan visi, integritas personal, atau program kerja kandidat, melainkan oleh kemampuan membangun jaringan sosial-politik yang efektif, yang sebagian besar bersifat informal dan transaksional. Dalam hal ini, struktur sosia lokal terutama yang berkaitan dengan kedekatan simbolik, budaya, dan relasi keseharian lebih menentukan dibandingkan logika rasional pemilih. Kemenangan tidak hanya dimenangkan di panggung kampanye atau debat publik, tetapi justru di ruang-ruang kecil seperti rumah kepala desa, musala lingkungan, pos ronda, dan pertemuan informal komunitas lokal. Namun demikian, meskipun strategi ini terbukti efektif secara elektoral, praktik semacam ini menyimpan sejumlah persoalan serius bagi kualitas demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan. Ketika proses politik dijalankan berdasarkan pertukaran jasa dan loyalitas personal, maka prinsip meritokrasi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi terpinggirkan. Hal ini berisiko melanggengkan praktik korupsi politik, pengangkatan pejabat non-kompeten, serta alokasi anggaran yang tidak berbasis kebutuhan objektif masyarakat, melainkan berdasarkan "balas budi politik".

Lebih jauh, kondisi ini juga berpotensi mempersempit partisipasi politik yang sejati, karena hanya mereka yang memiliki akses terhadap jaringan patronase yang dapat terlibat secara efektif dalam proses politik. Sementara itu, warga biasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan elite politik atau broker lokal, akan cenderung menjadi penonton pasif atau bahkan terpinggirkan dalam distribusi manfaat pasca pemilu. Oleh karena itu, menurut penulis, penting untuk mulai mendorong reformasi budaya politik di tingkat lokal yang lebih menekankan pada penguatan partisipasi politik berbasis program dan gagasan, bukan semata hubungan sosial atau keuntungan pribadi. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan secara instan, mengingat patronase sudah mengakar dalam struktur sosial dan cara kerja politik lokal. Namun, melalui pendidikan politik, transparansi anggaran daerah, penguatan peran masyarakat sipil, serta pembatasan konflik kepentingan dalam penempatan jabatan, langkah-langkah pembenahan bisa mulai dijalankan secara bertahap. Singkatnya, praktik aliansi antara kandidat dan elite lokal memang merupakan strategi politik yang rasional dalam konteks politik elektoral di Indonesia. Namun apabila tidak disertai dengan upaya pengawasan dan reformasi institusional, maka relasi semacam ini berpotensi menghambat terciptanya sistem pemerintahan yang profesional, inklusif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik jangka panjang.

C. Keterlibatan dalam Patronase dan Vote Buying

Keterlibatan langsung antara tim kampanye dengan elite lokal dalam praktik pembelian suara serta distribusi sumber daya politik menunjukkan adanya hubungan patronase yang terstruktur. Kolaborasi ini bukan sekadar pelengkap strategi kampanye, melainkan merupakan komponen inti dari mesin politik patronase elektoral yang beroperasi secara sistematis melalui jaringan informal partai politik, tokoh masyarakat, serta aparat desa atau kelurahan. Praktik ini umumnya memuncak menjelang hari pemilu, ketika mobilisasi pemilih dilakukan secara intensif dengan mengandalkan data konstituen yang telah dihimpun sebelumnya oleh tim kampanye dan jejaring lokal.

Seorang mantan anggota tim pemenangan mengungkapkan hal ini sebagai bagian dari strategi yang telah dirancang secara matang.

> *"Biasanya ya dua hari sebelum coblosan. Kita sudah punya data, siapa yang kira-kira bisa digerakkan. Ada yang dibantu beras, uang transport, atau janji pekerjaan yang dijanjikan kalau menang."(Wawancara, Mantan Tim Pemenangan, 31 Mei 2025).*

Dalam praktiknya, vote buying tidak hanya dilakukan dengan memberikan uang tunai secara langsung, tetapi juga melalui bentuk-bentuk patronase non-moneter, seperti janji pekerjaan, bantuan sosial, proyek desa, hingga jaminan akses pendidikan atau kesehatan. Strategi ini menunjukkan bahwa bentuk pertukaran elektoral yang terjadi tidak bersifat sederhana, tetapi telah berkembang menjadi sistem sosial-politik yang kompleks, di mana pemilih diposisikan sebagai klien yang "berutang dukungan" kepada patron politik yang berkuasa. Seorang pengurus partai di tingkat kabupaten juga menegaskan mekanisme ini:

> *"Kami tahu daerah mana yang kritis, jadi kita arahkan bantuan ke sana. Bisa berupa sembako, atau uang saku buat relawan lapangan. Tapi ya enggak semua terang-terangan, kadang lewat tokoh lokal yang mereka percaya."(Wawancara, Pengurus Partai, 23 Mei 2025).*

Dalam kerangka teori patronase politik yang dikemukakan oleh Edward Aspinall (2014), praktik vote buying merupakan bagian dari relasi pertukaran patron-klien yang terjadi dalam demokrasi klientelistis. Dalam model ini, dukungan politik tidak diberikan berdasarkan pertimbangan rasional atau ideologis, melainkan sebagai imbalan atas janji atau pemberian material dari kandidat atau partai. Proses ini semakin kuat ketika disalurkan melalui broker politik lokal, yang menjadi penghubung antara patron dan komunitas pemilih. Seorang kepala desa yang terlibat secara tidak langsung dalam proses kampanye juga membenarkan pola tersebut:

"Kalau dari kami sih enggak langsung bagi uang, tapi bantu fasilitasi. Kadang masyarakat dikasih sembako atau bantuan lainnya. Kita hanya menyampaikan, ini bentuk perhatian dari calon. Masyarakat anggap itu wajar." (Wawancara, Kepala Desa, 14 Mei 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa praktik patronase sudah menjadi bagian dari bahasa politik lokal yakni mekanisme yang dianggap wajar dan bahkan diharapkan dalam setiap kontestasi politik. Ketika bantuan atau insentif diberikan menjelang pemilu, masyarakat cenderung menginterpretasikannya sebagai bentuk perhatian, bukan sebagai pelanggaran hukum elektoral. Dalam konteks ini, patronase tidak hanya menjadi alat pemenangan, tetapi juga mengonstruksi relasi kekuasaan yang berbasis loyalitas dan ketergantungan politik.

Akibatnya, praktik vote buying dan patronase berdampak pada reproduksi struktur politik yang mengutamakan relasi personal ketimbang kapabilitas kelembagaan. Hal ini memperlemah prinsip meritokrasi dalam pelayanan publik, karena akses terhadap program dan sumber daya negara cenderung diberikan berdasarkan kedekatan politik, bukan kebutuhan objektif. Selain itu, praktik ini juga memelihara ketergantungan jangka panjang antara masyarakat dan elite, karena warga terbiasa melihat negara sebagai sumber kemurahan hati pribadi para politisi, bukan sebagai institusi yang melayani secara adil dan setara. Seorang tim sukses daerah menjelaskan secara gamblang:

"Warga itu bukan enggak tahu, tapi mereka realistis. Kalau enggak dikasih apa-apa, mereka mikir, kenapa harus dukung? Kita juga, kalau enggak kasih apa-apa, bisa ditinggal. Jadi itu seperti saling paham aja."(Wawancara, Tim Sukses, 29 Mei 2025)

Hal ini menguatkan pemahaman bahwa demokrasi lokal masih sangat dipengaruhi oleh logika pertukaran jangka pendek, di mana dukungan diberikan atas dasar manfaat langsung yang diterima. Program jangka panjang, visi pembangunan, atau kebijakan

publik sering kali tidak menjadi pertimbangan utama, karena relasi antara kandidat dan pemilih dibangun di atas struktur loyalitas yang berbasis material dan emosional. Fenomena keterlibatan tim kampanye, elite lokal, dan aktor akar rumput dalam praktik *vote buying* dan patronase politik menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di tingkat lokal masih sangat dipengaruhi oleh logika pertukaran material yang bersifat jangka pendek. Praktik-praktik ini tidak berdiri sendiri sebagai strategi sesaat, melainkan telah membentuk sistem patronase yang sistematis, di mana jaringan informal partai, tokoh masyarakat, dan aparat desa/kelurahan memainkan peran kunci dalam membangun dan mempertahankan loyalitas politik (Ismail, 2003).

Dalam konteks ini, pembelian suara tidak selalu hadir dalam bentuk uang tunai, tetapi juga melalui skema patronase non-moneter seperti janji pekerjaan, bantuan sosial, dan akses terhadap layanan publik. Ini mencerminkan bahwa relasi antara kandidat dan pemilih tidak bersifat rasional-ideologis, melainkan relasional dan transaksional. Kandidat dan partai diposisikan sebagai *patron*, sedangkan warga berperan sebagai *klien* yang merasa “berutang” dukungan sebagai imbalan atas bantuan yang diterima. Apa yang tampak dalam wawancara-wawancara tersebut menguatkan argumen Edward Aspinall tentang berjalannya praktik patron-klien dalam sistem demokrasi klientelistis. Keberadaan *broker* lokal, termasuk kepala desa dan tokoh masyarakat, menjadi sangat penting karena mereka berperan sebagai perantara yang melegitimasi dan memfasilitasi bentuk-bentuk bantuan tersebut dalam bingkai "kepedulian", bukan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Relasi ini tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga kultural, karena sudah menjadi bagian dari bahasa politik lokal yang dianggap wajar bahkan diharapkan.Konsekuensinya, praktik ini memperkuat pola relasi kuasa yang bersandar pada loyalitas personal dan kedekatan, bukan pada kapabilitas atau program yang ditawarkan kandidat. Hal ini melemahkan prinsip meritokrasi dalam birokrasi publik dan memperburuk kualitas demokrasi, karena warga terbiasa mengakses hak-haknya melalui jalur informal dan relasional, bukan institusional. Demokrasi lokal pun kehilangan substansinya karena yang berlangsung

bukanlah kompetisi gagasan dan program, melainkan kompetisi pemberian material dan insentif langsung (Fokatea & Mas'udi, 2020).

Lebih jauh, ketergantungan warga terhadap elite politik dalam mengakses sumber daya negara menciptakan siklus patronase yang sulit diputus. Masyarakat menjadi terbiasa melihat negara sebagai perpanjangan tangan dari kemurahan hati politisi, bukan sebagai institusi netral yang harus melayani secara adil. Dalam jangka panjang, ini menimbulkan tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi karena mempersempit ruang partisipasi politik yang rasional dan memperkuat oligarki lokal yang berakar pada hubungan transaksional dan emosional. Dengan demikian, penulis memandang bahwa praktik *vote buying* dan patronase bukan sekadar masalah etika elektoral, tetapi merupakan gejala dari struktur politik yang belum sepenuhnya demokratis. Untuk mengubahnya, dibutuhkan transformasi struktural melalui penguatan kelembagaan, pendidikan politik warga, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran elektoral. Tanpa itu, demokrasi lokal akan terus direduksi menjadi ajang pertukaran kepentingan sesaat, bukan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan publik secara berkelanjutan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya mesin politik, khususnya peran partai politik sebagai instrumen formal dalam membangun tim sukses yang efektif untuk memenangkan Pilkada. Mobilisasi pendukung dalam konteks politik elektoral di Indonesia tidak hanya bergantung pada partai politik, tetapi juga melibatkan jaringan informal seperti keluarga, teman, dan kelompok sosial lainnya. Namun, dalam kasus Pilkada Temanggung 2024, pasangan Agus-Nadia berhasil memanfaatkan struktur formal partai politik secara optimal sebagai mesin politik utama mereka, yang terbukti efektif dalam meraih kemenangan.

Penelitian ini juga mengkaji mekanisme perekrutan pendukung dan tim sukses yang dilakukan oleh partai politik pengusung, serta bentuk-bentuk transaksi politik yang terjadi antara pasangan calon dan partai. Transaksi politik dan politik patronase menjadi bagian penting dalam strategi pemenangan, di mana koalisi partai berperan sebagai mesin politik yang menggerakkan dukungan secara terorganisir dan sistematis. Selain itu, studi ini menegaskan bahwa pola kemenangan dalam Pilkada Temanggung cenderung dinamis dan tidak didominasi oleh satu partai politik secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih di Temanggung bersifat rasional dan terbuka terhadap berbagai alternatif politik, sehingga kekuatan koalisi dan figur calon menjadi faktor penentu utama kemenangan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang mesin politik dan transaksi politik dalam konteks pilkada, khususnya bagaimana partai politik digunakan sebagai alat mobilisasi dukungan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan wawasan strategis bagi kandidat dan tim sukses dalam merancang dan mengoptimalkan mesin politik berbasis partai untuk memenangkan kontestasi politik di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik lokal, strategi pemenangan pilkada, serta peran partai politik sebagai

mesin politik formal yang mampu mengintegrasikan berbagai elemen dukungan dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Temanggung 2024.

B. Saran

Penelitian ini tampak sangat mengandalkan data sekunder dan studi literatur, sementara data primer seperti wawancara langsung dengan aktor kunci (kandidat, tim sukses, pengurus partai, dan pemilih) kurang ditonjolkan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan pengumpulan data primer secara lebih mendalam agar analisis menjadi lebih komprehensif dan valid. Penelitian hanya berfokus pada satu kasus, yaitu Pilkada Kabupaten Temanggung 2024 dengan pasangan Agus-Nadia. Hal ini membatasi kemampuan penelitian untuk melakukan generalisasi temuan ke daerah lain dengan karakteristik politik yang berbeda. Penelitian lanjutan sebaiknya memasukkan studi komparatif dengan daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih luas tentang pola mobilisasi politik. Pembahasan mengenai bentuk dan dampak transaksi politik antara kandidat dan partai politik masih bersifat deskriptif. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengupas lebih dalam aspek-aspek etis, hukum, dan dampak jangka panjang dari praktik transaksi politik dan patronase terhadap kualitas demokrasi lokal.

Penelitian ini lebih menekankan pada peran partai politik sebagai mesin politik formal, sementara peran jaringan informal seperti keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial kurang dieksplorasi. Padahal, jaringan informal seringkali menjadi faktor penentu dalam mobilisasi dukungan di tingkat lokal. Penelitian mendatang sebaiknya mengkaji interaksi antara mesin politik formal dan informal secara lebih seimbang. Meskipun disebutkan adanya praktik politik uang dalam pilkada sebelumnya, penelitian ini belum membahas secara mendalam dampak politik uang terhadap perilaku pemilih dan integritas proses demokrasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana politik uang memengaruhi hasil pemilu dan persepsi masyarakat terhadap demokrasi. Dengan mengatasi kekurangan-kekurangan di atas, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan ilmu politik, khususnya terkait strategi pemenangan pilkada dan dinamika mesin politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Apriani, & Maharani. (2019a). Strategi Pemenangan Pasangan Calon Herman Deru Dan Mawardi Yahya Pada Pilkada Sumatera Selatan. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, *3*(1).

Apriani, R., & Maharani, M. (2019b). Strategi Pemenangan Pasangan Calon Herman Deru Dan Mawardi Yahya Pada Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2018. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, *3*(1), 17–27.

Aspinal, A., & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia (Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014)*. Penerbit PolGov.

Aspinall. (2022). *Mobilizing for Elections (Patronage and Political Machines in Southeast Asia)*. Univercity Press.

Aspinall, & Berenshcot. (2019). *Democracy For Sale: Elections, Clientelism and The State in Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Aspinall, E. (2010). The Irony of Success: Party System Reform in Indonesia, 1998–2007. In E. Aspinall & M. Mietzner (Eds.), *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society* (pp. 45–61). Institute of Southeast Asian Studies.

Budiarjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Candra, A. (2014). KEKUATAN POLITIK LOKAL DALAM PEMENANGAN SYAHRUL YASIN LIMPO (SYL) PADA PEMILIHAN GUBERNUR 2013 DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN GOWA. In *book auth.] Skripsi. Makassar : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN*. Universitas Hasanuddin.

Creswell. (2012). *Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

Efriza. (2016). *Kekuasaan Politik, Perkembangan Konsep, Analisis Dan Kritik*. Intrans Publising.

Fokatea, F. A., & Mas'udi, W. (2020). Konsolidasi Elit Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula. *Journal of Governance and Social Policy*, *1*(2), 70–85.

Gloria. (2023). *UPAYA MEMBANGUN MESIN POLITIK OLEH YOHANIS BASSANG PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN TORAJA UTARA*.

Hayyi, A., Hidayatullah, H., & Amil, A. (2020). Kekuatan Politik Ormas (Amphibi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Ahyar-Mori Pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. *Journal of Government and Politics (JGOP*, *2*(1), 39–56.

Hidayat, A. (2018). Perkembangan Partai Politik pada Masa. *Jurnal Ilmiah Mimar Demokrasi*, *17*(2).

Ishak. (2010). *Peta Kekuatan Politik pemilihan kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010*.

Ismail. (2003). Islamic Traditionalism in Indonesia. In *Ismail*. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI.

Maulida, K., Hertanto, H., & Kurniawan, R. C. (2021). Strategi Pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *6*(2), 215–233.

Prihatmoko, J. (2005). Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia. In *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.

Sahea, Rifaldi, Niode, Burhan, Tulung, & Trilke. (2018). Analisis Strategi Politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, *1*(1).

Soelistyati, & Ghani. (1989). *Pengantar Ilmu Politik*.

Sugiarto. (2014). Strategi pemenangan dalam pemilihan kepala daerah. *E-Journal UNAIR*, *2*.

Surahmadi. (2016). Strategi Pemenangan Politik Pasangan Idza-Narjo Dalam Pemilukada Kabupaten Brebes Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmu Politik*, *2*, 7.

Suryadi, B. (2006). *Kerangka Analisis Sisitem Politik Indonesia*. IRCiSoD.

Ulum, M. B. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, *4*(2), 309–343.

UUD NKRI. (1997). *Mobilisasi dan Demobilisasi*. UUD 1945.

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana struktur partai Anda berperan dalam tim pemenangan pasangan Agus–Nadia?
2. Apa saja langkah konsolidasi internal partai yang dilakukan untuk Pilkada 2024?
3. Bagaimana masing-masing partai memanfaatkan basis kekuatannya dalam strategi kampanye?
4. Apa bentuk kegiatan atau pendekatan yang digunakan dalam mobilisasi pemilih?
5. Bagaimana peran kader partai di tingkat desa dalam menyosialisasikan program pasangan calon?
6. Apa peran tokoh agama, masyarakat, atau komunitas dalam kampanye pasangan Agus–Nadia?
7. Bagaimana partai menjalankan fungsi komunikasi politik dan artikulasi kepentingan masyarakat?
8. Bagaimana partai menyerap dan mengolah aspirasi masyarakat ke dalam materi kampanye?
9. Apa bentuk pelatihan atau pengorganisasian saksi yang dilakukan menjelang pemungutan suara?
10. Bagaimana kerja sama antar partai dalam koalisi dikoordinasikan secara teknis dan strategis?
11. Apa pertimbangan utama partai dalam mendukung pasangan Agus-Nadia?
12. Sejauh mana kesiapan finansial dan logistik calon memengaruhi keputusan dukungan partai?

13. Bagaimana partai memandang latar belakang Nadia sebagai perempuan dan santri dalam strategi elektoral?

14. Apakah terdapat negosiasi awal sebelum partai mengeluarkan surat dukungan resmi?

15. Apa bentuk kontribusi atau dukungan yang diberikan partai selama proses kampanye?

16. Bagaimana proses awal komunikasi dan negosiasi dengan partai-partai pendukung?

17. Apa saja bentuk kesepakatan atau transaksi politik yang terjadi sebelum pencalonan?

18. Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab antara tim kandidat dan partai dalam kampanye?

19. Apakah ada komitmen politik jangka panjang kepada partai setelah pilkada selesai?

20. Apa motivasi Anda dalam memberikan dukungan kepada pasangan Agus-Nadia?

21. Bagaimana bentuk dukungan yang Anda berikan selama masa kampanye?

22. Apakah Anda ikut membantu mobilisasi pemilih di tingkat desa?

23. Bagaimana Anda melihat peran kepala desa dalam politik lokal, khususnya dalam pilkada?

24. Bagaimana proses penjaringan calon dalam partai Anda hingga akhirnya mendukung pasangan Agus–Nadia?

25. Apa pertimbangan utama partai dalam menentukan dukungan kepada pasangan calon?

26. Bagaimana struktur partai (dari DPC hingga ranting) dilibatkan dalam proses seleksi dan pemenangan?

27. Apa bentuk strategi mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh partai Anda?

28. Bagaimana peran tokoh masyarakat, agama, atau komunitas lokal dalam mendukung kerja partai?

29. Sejauh mana media sosial digunakan oleh partai dalam mendukung pasangan Agus–Nadia?

30. Bagaimana Anda melihat hubungan antara elite partai dan akar rumput dalam kerja mesin politik ini?

31. Untuk Tim Pemenangan Pasangan Agus–Nadia

32. Bagaimana kerja sama antara tim pemenangan dan partai politik dalam kampanye?

33. Apa saja strategi yang digunakan untuk menjangkau pemilih muda dan pemula?

34. Bagaimana narasi politik dan citra pasangan dibangun dalam media sosial?

35. Sejauh mana partai memberi dukungan logistik dan jaringan sosial dalam proses kampanye ?

36. Untuk Tokoh Lokal, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat

37. Apa motivasi Anda dalam mendukung pasangan Agus–Nadia?

38. Apa bentuk keterlibatan Anda dalam proses kampanye di tingkat lokal?

39. Bagaimana peran tokoh informal seperti Anda dalam memengaruhi preferensi politik warga?

40. Apakah ada komunikasi langsung antara Anda dan tim pemenangan atau partai?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1. Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024.



Gambar 2. Pengambilan dan Penetapan Nomor Urut Calon Ketua dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung.



Gambar 3. Wawancara dengan Anggota Partai PKS



Gambar 4. Wawancara dengan Anggota Tim Pemenangan



Gambar 5. Wawancara dengan Tim Koalisi PPP.



Gambar 6. Wawancara dengan Kepala desa Wonoboyo.



Gambar 7. Wawancara dengan Tim Pemenangan Agus-Nadia.



Gambar 8. Wawancara Ketua Partai PDIP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Riza utami
TTL	: Temanggung, 27 Mei 2003
Alamat	: Wonocoyo, Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, RT.02/01
NIM	: 2106016046
Jurusan	: Ilmu Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama	: Islam
Email	: risaut12@gmail.com
No. Hp	: 0813859399

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 01 Wonocoyo

2. SMP Islam Ngadirejo

3. SMK Swadaya Temanggung

Riwayat Organisasi : 1. DEMA FISIP UIN Walisongo